

**PENGARUH UPAH, INVESTASI DAN PENGELUARAN
PEMERINTAH TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA
PADA SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA TAHUN
2012-2015**

**NURMA EKA LESTARI
8105132163**



**Skripsi ini Disusun sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri
Jakarta**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2017**

**THE INFLUENCE OF WAGES, INVESTMENT AND
GOVERNMENT EXPENDITURE ON LABOR ABSORPTION
AGRICULTURAL SECTOR IN INDONESIA YEARS
2012-2015**

**NURMA EKA LESTARI
8105132163**



**Skripsi is Written as Part of Bachelor Degree in Education Accomplishment
at The Faculty of Economic, State University of Jakarta**

**STUDY PROGRAM EDUCATION OF ECONOMICS
FAKULTY OF ECONOMICS
STATE UNIVERSITY OF JAKARTA
2017**

ABSTRAK

Nurma Eka Lestari. *“Pengaruh Upah, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Pertanian di Indonesia tahun 2012-2015”*. Skripsi. Pendidikan Ekonomi Koperasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2017. Dosen Pembimbing: Dr. Sri Indah Nikensari, SE, M.SE dan Dr. Karuniana Dianta AS, SIP, ME

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis **Pengaruh Upah, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Pertanian di Indonesia**. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi data panel menggunakan data *time series* dari tahun 2012-2015 dan data *cross section* 10 provinsi di Indonesia dengan pendekatan *ex post facto* dan menggunakan metode *fixed effect* yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian (Pusdatin Kementan), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Kementerian Keuangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Dengan menggunakan model analisis regresi data panel, output menunjukkan bahwa upah (X1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (Y) pada sektor pertanian di Indonesia. Investasi (X2) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (Y) pada sektor pertanian di Indonesia. Pengeluaran pemerintah (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (Y) pada sektor pertanian di Indonesia.

Kata Kunci : Upah, Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Penyerapan Tenaga Kerja

ABSTRACT

Nurma Eka Lestari. "Influence of Wages, Investment and Government Expenditure on Labor Absorption of Agricultural Sector in Indonesia in 2012-2015". Skripsi. Economic Education Cooperative. Faculty of Economics. State University of Jakarta. 2017. Lecturer Advisor: Dr. Sri Indah Nikensari, SE, M.SE and Dr. Ir. Karuniana Dianta AS, SIP, ME

This research is aims to analyze Influence of Wages, Investment and Government Expenditure on Labor Absorption in the Agricultural Sector in Indonesia. The research method used is panel data regression analysis using time series data from 2012-2015 and cross section data of 10 provinces in Indonesia with ex post facto approach and using fixed effect obtained from Central Statistics Agency (BPS), Data and Information Center of Ministry of Agriculture (Pusdatin Kementan) , the Investment Coordinating Board (BKPM), and the Ministry of Finance. Data analysis technique used in this research is panel data regression analysis. Using the panel data regression analysis model, output shows that wage (X1) has a negative and significant effect on labor absorption (Y) on agricultural sector in Indonesia. Investment (X2) has a positive and insignificant effect on labor absorption (Y) in agriculture sector in Indonesia. Government expenditure (X3) has a positive and significant effect on labor absorption (Y) in agriculture sector in Indonesia.

Keywords: Wages, Investment, Government Expenditure, Labor Absorption

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Dedi Purwana ES, M.Bus
NIP. 19671207 199203 1 001

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. <u>Dr. Harya Kuncara, SE, M.Si</u> NIP. 19700207 200812 1 001	Ketua		02-08-2017
2. <u>Dr. Siti Nurjanah, SE, M.Si</u> NIP. 19720114 199802 2 001	Penguji Ahli		01-08-2017
3. <u>Dicky Iranto, SE, M.Si</u> NIP. 19710612 200112 1 001	Sekretaris		01-08-2017
4. <u>Dr. Sri Indah Nikensari, SE, M.SE</u> NIP. 19620809 199003 2 001	Pembimbing I		01-08-2017
5. <u>Dr. Karuniana Dianta A.S, S.IP, ME</u> NIP. 19800924 200812 1 002	Pembimbing II		01-08-2017

Tanggal Lulus : 26 Juli 2017

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana di Universitas Negeri Jakarta.
2. Skripsi ini belum pernah dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademi berupa pencabutan gelar yang diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, Juli 2017

Yang Membuat Pernyataan



Nurma Eka Lestari

NIM. 8105132163

MOTTO DAN LEMBAR PERSEMBAHAN



Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain.

(Q.S Al-Insyirah: 5-8)

Skripsi ini terbentuk tidak lepas dari dukungan orang-orang di sekeliling saya. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada khususnya kedua orang tua maupun kerabat atas do'a dan dukungan baik moril maupun materiil. Maaf jika skripsi ini jauh dari kata sempurna.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kalian.

Pesan saya:

“Teruslah berusaha karena usaha tidak akan mengkhianati hasil, dan tidak ada usaha yang sia-sia”

-Nurma Eka Lestari-

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan di Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.

Dalam menyusun skripsi ini, peneliti banyak memperoleh bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Dr. Dedi Purwana, E.S., M.Bus., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;
2. Suparno, S.Pd, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi;
3. Dr. Sri Indah Nikensari, S.E, M.SE., selaku Dosen Pembimbing I;
4. Dr. Karuniana Dianta A.S, S.IP, M.E., selaku Dosen Pembimbing II;
5. Dr. Harya Kuncara, SE, M.Si, selaku Ketua Penguji;
6. Dr. Siti Nurjanah, SE, M.Si., selaku Penguji Ahli;
7. Dicky Iranto, SE, ME, selaku sekretaris;
8. Kedua orang tua beserta adik-adik saya yang telah membantu dalam proses penelitian, baik dalam bentuk dukungan moril maupun materil;
9. Sahabat yang selalu memberikan dukungan dan semangat yaitu, Yusron Arifin, Puput Melati dan Fitrah Rofikoh

10. Zania Ulfah Satari, Putri Addini, Rizky Khairil, Fauzi Nurrahman, Maulia Resta, Siti Salimatusa'diyah serta seluruh keluarga di Ekop 2013.

Peneliti menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu peneliti sangat membuka hati untuk menerima kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, baik peneliti maupun pembaca.

Jakarta, Juli 2017

Peneliti

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
MOTTO DAN LEMBAR PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GRAFIK	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Pembatasan Masalah	11
D. Perumusan Masalah	11
E. Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II. KAJIAN TEORETIK.....	13
A. Deskripsi Konseptual	13
1. Teori Migrasi.....	13
a. Teori Lewis.....	13
b. Teori Todaro	13
2. Permintaan Tenaga Kerja.....	14
3. Penawaran Tenaga Kerja.....	16
4. Penyerapan Tenaga Kerja	18
5. Tingkat Upah.....	22
6. Investasi.....	27

7. Pengeluaran Pemerintah.....	32
B. Hasil Penelitian Yang Relevan.....	37
C. Kerangka Teoretik.....	39
D. Perumusan Hipotesis.....	42
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	43
A. Tujuan Penelitian	43
B. Obyek dan Ruang Lingkup Penelitian	43
C. Metode Penelitian.....	44
D. Konstelasi Hubungan antar Variabel	44
E. Jenis dan Sumber Data.....	45
F. Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	45
1. Penyerapan Tenaga Kerja	45
a. Definisi Konseptual	45
b. Definisi Operasional	45
2. Tingkat Upah.....	46
a. Definisi Konseptual	46
b. Definisi Operasional	46
3. Investasi	46
a. Definisi Konseptual	46
b. Definisi Operasional	47
4. Pengeluaran Pemerintah.....	47
a. Definisi Konseptual	47
b. Definisi Operasional	47
G. Teknik Analisis Data.....	48
1. Analisis Data Panel.....	48
2. Memilih Model Terbaik dalam Regresi Data Panel	50
3. Deteksi Asumsi Klasik	52
4. Uji Hipotesis	55
5. Analisis Koefisien Determinasi	58
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Deskripsi Data.....	59

1. Penyerapan Tenaga Kerja.....	59
2. Tingkat Upah	61
3. Investasi	62
4. Pengeluaran Pemerintah	63
B. Uji Spesifikasi Model.....	64
1. Pemilihan Model Terbaik	64
2. Deteksi Asumsi Klasik	66
3. Persamaan Regresi.....	68
4. Uji Hipotesis	69
4. Analisis Koefisien Determinasi	72
5. Spesifikasi Fixed Effect.....	73
C. Pembahasan.....	74
D. Keterbatasan Penelitian.....	78
BAB V. KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN	79
A. Kesimpulan	79
B. Implikasi.....	80
C. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	87

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Jumlah Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama	2
--	---

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian.....	3
Tabel 1. 3 Investasi PMDN Sektor Pertanian	7
Tabel 1. 4 Investasi PMA Sektor Pertanian	8
Tabel 1. 5 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian	9
Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif	59
Tabel 4. 2 Data Penyerapan Tenaga Kerja Tertinggi dan Terendah	60
Tabel 4. 3 Data Upah Tenaga Kerja Tertinggi dan Terendah	61
Tabel 4. 4 Data Investasi Tertinggi dan Terendah	62
Tabel 4. 5 Data Pengeluaran Pemerintah Tertinggi dan Terendah	63
Tabel 4. 6 Uji Chow	65
Tabel 4. 7 Uji Hausman	65
Tabel 4. 8 Deteksi Heteroskedastisitas.....	67
Tabel 4. 9 Deteksi Multikolinearitas	67
Tabel 4. 10 Deteksi Autokorelasi.....	68
Tabel 4. 11 Persamaan Regresi	69
Tabel 4. 12 Hasil Uji F.....	70
Tabel 4. 13 Hasil Uji t.....	70
Tabel 4. 14 Spesifikasi Fixed Effect	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kurva Permintaan Tenaga Kerja	15
Gambar 2. 2 Kurva Penawaran Tenaga Kerja.....	17

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian.....	87
Lampiran 2 Data Upah Minimum.....	88
Lampiran 3 Data Investasi Sektor Pertanian.....	88
Lampiran 4 Data Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian	90
Lampiran 5 Common Effect.....	91
Lampiran 6 Fixed Effect	92
Lampiran 7 Chow Test.....	93
Lampiran 8 Random Effect.....	94
Lampiran 9 Hausman Test	95
Lampiran 10 Deteksi Normalitas	96
Lampiran 11 Deteksi Heteroskedastisitas	97
Lampiran 12 Deteksi Multikolinearitas	98
Lampiran 13 Deteksi Autokorelasi	99
Lampiran 14 Data Panel.....	100
Lampiran 15 Tabel F.....	102
Lampiran 16 Tabel t.....	103

BAB I

PENDAHULUAN

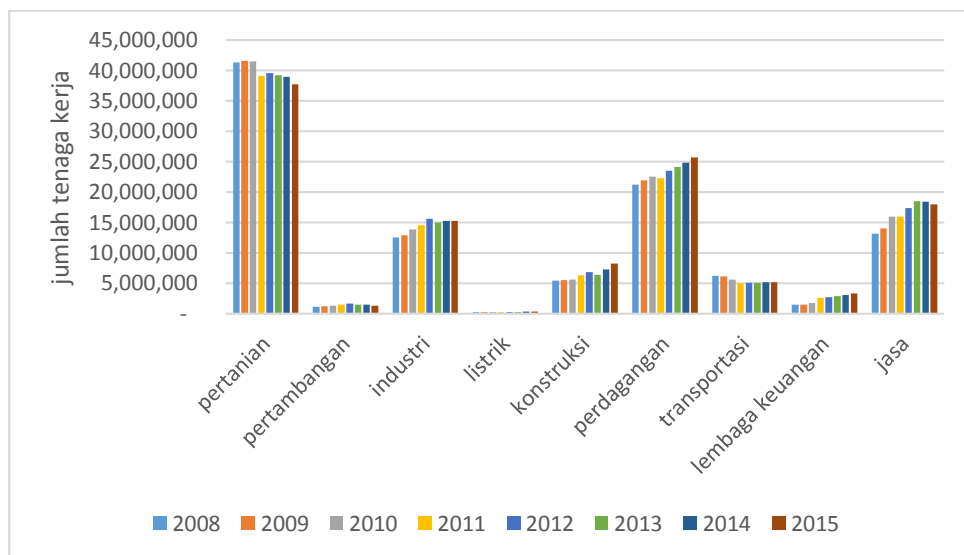
A. Latar Belakang Masalah

Pertanian merupakan sektor primer yang dapat membantu pembangunan ekonomi. Dengan kata lain, pertanian adalah sektor utama penyumbang perekonomian karena sebagian besar perekonomian Indonesia berasal dari hasil pertanian. Sektor pertanian juga merupakan sektor yang memiliki peranan strategis untuk pembangunan perekonomian nasional. Hal tersebut di dasari atas peranan penting yang dimiliki sektor ini, yaitu potensi Sumber Daya Alam yang melimpah, besarnya pangsa pasar ekspor, serta besarnya jumlah penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini.

Pertanian dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu pertanian rakyat dan pertanian besar. Pertanian rakyat masih dikelola oleh rakyat secara tradisional dengan modal yang tidak cukup besar dengan area atau luas lahan yang sempit serta tanaman yang di budidayakan sedikit. Sedangkan pertanian besar yaitu pengelolaan yang dikelola oleh badan usaha atau perusahaan dengan mempekerjakan para petani. Pertanian besar ini memiliki modal besar, lahan yang luas, serta hasil pertanian untuk konsumsi masyarakat dan sebagian untuk komoditas ekspor agar mendapatkan keuntungan. Pertanian tidak hanya areal persawahan saja tetapi di dalamnya terdapat perkebunan.

Pertanian dapat menghasilkan devisa bagi perekonomian jika lebih dikembangkan. Selain itu, sumber modal yang utama bagi pertumbuhan ekonomi di dapatkan dari sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi sehingga dapat menampung luapan tenaga kerja Indonesia yang berlimpah yang kemudian akan mengurangi angka pengangguran.

Grafik 1. 1 Jumlah Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah peneliti

Berdasarkan grafik 1.1 di atas terlihat bahwa tenaga kerja di beberapa sektor mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada grafik di atas, sektor pertanian menduduki posisi pertama dengan jumlah tenaga kerja terbanyak, selanjutnya sektor perdagangan pada urutan ke dua, jasa pada urutan ke tiga, industri pada urutan ke empat, konstruksi pada urutan ke lima, transportasi pada urutan ke enam, lembaga keuangan pada urutan ke tujuh, pertambangan pada urutan ke delapan dan posisi terakhir yaitu sektor listrik. Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja sektor pertanian memiliki jumlah tenaga

kerja terbanyak dibandingkan sektor lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja di Indonesia di dominasi oleh sektor pertanian.

Sektor pertanian dianggap sebagai sektor utama penghasil dalam kontribusinya yang sangat besar sebagai penyumbang perekonomian. Sektor pertanian yang merupakan sektor primer seharusnya mampu menyerap tenaga kerja dengan baik, karena sektor ini memiliki peran yang besar dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun setelah terjadinya transformasi sektor ekonomi, tenaga kerja yang terserap pada sektor pertanian kian tertinggal dan cenderung menurun. Berikut penyerapan tenaga kerja sektor pertanian:

Tabel 1. 1 Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian

Tahun	Tenaga Kerja Sektor Pertanian (juta jiwa)	Perkembangan Tenaga Kerja (dalam persen)
2008	42.010.671	0,24 %
2009	42.320.667	0,73 %
2010	42.160.374	-0,37 %
2011	40.772.362	-3,3 %
2012	40.627.815	-0,35 %
2013	39.992.491	-1,56 %
2014	39.903.043	-0,22 %
2015	38.935.522	-2,42 %

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah peneliti

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2008-2015 tenaga kerja pada sektor pertanian menurun. Pada tahun 2008-2009 jumlah tenaga kerja meningkat dari 0,24% menjadi 0,73%, namun pada tahun selanjutnya jumlah tenaga kerja menurun dari -0,37% ke -3,3%. Angka perubahan sebesar -3,3% yang terjadi pada tahun 2011 merupakan puncak menurunnya jumlah tenaga kerja sektor pertanian tertinggi. Penurunan jumlah tenaga kerja terus

terjadi pada tahun-tahun selanjutnya. Dapat terlihat pada tahun 2015 tenaga kerja terus menurun hingga sebesar -2,42%. Menurunnya jumlah tenaga kerja pertanian disebabkan karena sebagian tenaga kerja mulai beralih bekerja di sektor non pertanian. Dengan menurunnya jumlah tenaga kerja artinya penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian rendah.

Penyerapan tenaga kerja sektor pertanian menjadi salah satu peran penting bagi pembangunan nasional. Namun sasaran pembangunan nasional ini belum menunjukkan hasil yang maksimal tetapi cenderung memperhatikan. Kondisi penyerapan tenaga kerja sektor pertanian yang kian memprihatinkan, salah satunya ditandai oleh minimnya lahan pertanian.

Dewasa ini, terdapat banyaknya alih fungsi lahan pertanian baik untuk industri maupun dijadikan area pemukiman sehingga membuat minimnya jumlah lahan pertanian. Luas lahan pertanian di Indonesia saat ini sekitar 13 juta hektare dengan rata-rata lahan yang dimiliki oleh para petani sekitar 0,3 sampai 0,4 hektare¹. Jika dibandingkan dengan Negara lain, Indonesia masih memiliki luas lahan pangan yang tergolong sempit. Amerika memiliki luas lahan mencapai 450 juta hektare, India 170 juta hektare, dan Nigeria 72 juta hektare². Kondisi tersebut membuat petani Indonesia sulit untuk mengembangkan sektor pertanian. Minimnya lahan pertanian ini berdampak pada jumlah penyerapan tenaga kerja.

¹ Afriza Hanifa, *Kritis, Jumlah Lahan Pertanian di Indonesia*, <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/12/05/26/m4mavr-kritis-jumlah-lahan-pertanian-di-Indonesia> (diakses pada Rabu, 11 Januari 14.50 WIB)

² Debbie Sutrisno, *Lahan Pangan Indonesia Masih Sempit*, <http://www.republika.co.id/berita/koran/ekonomi-koran/16/11/29/ohe3cc19-lahan-pangan-Indonesia-masih-sempit> (diakses pada Rabu, 11 Januari 15.00 WIB)

Pertanian dianggap tidak dapat menopang kehidupan khususnya bagi generasi muda. Banyak kaum muda khususnya kaum muda di pedesaan lebih memilih untuk merantau dan bekerja selain bertani. Berkurangnya minat generasi muda untuk mengelola lahan pertanian juga disebabkan karena banyak masyarakat yang menilai kesejahteraan petani yang masih rendah.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja antara lain (1) pertumbuhan ekonomi (2) tingkat upah (3) investasi (4) pengeluaran pemerintah.

Faktor pertama yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama pembangunan yang dapat dilihat melalui PDB, setiap Negara akan selalu berusaha untuk menjaga pertumbuhan ekonomi untuk menjamin kehidupan masyarakat yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi juga sangat berperan dalam hal penyerapan tenaga kerja. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang salah satunya adalah menjaga penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian itu sendiri.

Faktor kedua yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian adalah tingkat upah. Upah merupakan faktor yang sangat penting dalam hubungannya dengan penyerapan tenaga kerja. Upah dianggap sangat penting oleh para pekerja, karena dengan adanya upah, maka para pekerja akan semangat dalam menjalankan pekerjaannya. Namun semenjak adanya kebijakan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah mendorong sebagian tenaga kerja untuk bermigrasi untuk mendapatkan pekerjaan dengan

upah yang lebih baik dan menyebabkan upah yang diterima petani rendah dibandingkan sektor lain. Model Todaro menjelaskan bahwa sebagian tenaga kerja cenderung mempertimbangkan serta membandingkan berbagai pasar tenaga kerja lalu memilih salah satu diantaranya yang dapat memaksimalkan keuntungan yang mereka harapkan³. Namun apabila sebagian tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian lain selain bertani, hanya dapat menikmati dampak dari kebijakan tersebut yaitu berupa upah yang minim yang diberi pemberi kerja yang kemudian akan berdampak ke kesejahteraan petani.

Upah merupakan hal yang paling sensitif apabila dikaitkan dengan pekerja. Upah pekerja di pertanian cenderung meningkat setiap tahunnya. Apabila dilihat dari sisi permintaan tenaga kerja, upah yang tinggi cenderung akan mengurangi jumlah pekerja yang bekerja pada sektor pertanian, dikarenakan para pemberi kerja akan mengurangi jumlah pekerja yang digunakan untuk memperoleh laba maksimum.

Faktor ketiga adalah investasi, investasi dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta. Investasi swasta terdiri dari investasi dalam negeri maupun luar negeri yang dapat diukur oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi swasta baik penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri dilaksanakan untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya penanaman modal, akan membantu pemerintah untuk mendanai kebutuhan sektor pertanian serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru yang dapat menyerap tenaga kerja.

³ Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Jilid I Ed. Ketujuh*, (Jakarta: Erlangga, 2000), p. 406

Data kementerian pertanian menunjukkan bahwa investasi asing di sektor pertanian, selain proporsinya paling rendah, juga mengalami penurunan pada tahun 2005 sampai 2009 dari 3,9 persen menjadi 1,2 persen⁴. Berikut data investasi PMDN dan PMA sektor pertanian:

Tabel 1. 2 Investasi PMDN Sektor Pertanian

Tahun	PMDN	
	Proyek	Nilai Rp Milliar
2010	225	8.883,8
2011	317	9.614,5
2012	211	9.728,9
2013	326	6.949,2
2014	360	13.357,89
2015	441	12.366,38

Sumber: BKPM, diolah peneliti

Berdasarkan Tabel 1.3 diatas, dapat terlihat bahwa jumlah investasi PMDN berfluktuasi. Perkembangan PMDN pada tahun 2010 sebesar 8.883,8 miliar rupiah dengan 225 proyek, pada tahun 2011 meningkat menjadi 9.614,5 miliar rupiah dengan 317 proyek, pada tahun 2012 sebesar 9.728,9 miliar rupiah namun jumlah proyek berkurang menjadi 211 proyek. Pada tahun 2013 nilai PMDN menurun menjadi 6.949,2 miliar rupiah akan tetapi jumlah proyek meningkat menjadi 326 proyek, kemudian pada tahun 2014 nilai PMDN mengalami peningkatan tajam menjadi sebesar 13.357,89 miliar rupiah tetapi jumlah proyek menurun menjadi 263 proyek. Sedangkan pada tahun 2015, investasi mengalami penurunan sebesar 12.366,38 miliar rupiah dengan 441 proyek.

⁴ Imam Prihadiyoko, Investasi Pertanian Tak Pernah Diurus Serius, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/04/13/20045422/Investasi.Pertanian.Tak.Pernah.Diurus.Serius> (diakses pada Kamis, 20 Juli 2017 pukul 22.50 WIB)

Tabel 1. 3 Investasi PMA Sektor Pertanian

Tahun	PMA	
	Proyek	Nilai US\$ Juta
2010	170	776
2011	278	1.243,6
2012	275	1.621,7
2013	539	1.616,6
2014	625	2.237,5
2015	704	2.147,1

Sumber: BKPM, diolah peneliti

Berdasarkan Tabel 1.4 diatas, dapat terlihat bahwa jumlah investasi PMA berfluktuasi. Perkembangan PMA pada tahun 2010 terjadi investasi PMA sebesar 776 juta dollar dengan 170 proyek, pada tahun 2011 meningkat menjadi 1.243,6 juta dollar dengan 278 proyek, pada tahun 2012 sebesar 1.621,7 juta dollar dengan jumlah proyek menurun menjadi 275 proyek. Kemudian tahun 2013 nilai PMDN menurun tipis menjadi 1.616,6 juta dollar akan tetapi jumlah proyek meningkat tajam menjadi 539 proyek, sedangkan pada tahun 2014 nilai PMA mengalami peningkatan menjadi sebesar 2.237,5 juta dollar dengan 625 proyek. Namun pada tahun 2015 nilai PMA menurun menjadi 2.147,1 juta dollar dengan proyek yang bertambah menjadi 704 proyek.

Tabel 1.3 dan 1.4 di atas menggambarkan kondisi iklim investasi yang berfluktuasi setiap tahunnya namun cenderung menurun di tahun 2014 dan 2015. Melambatnya pertumbuhan jumlah investasi baik PMDN maupun PMA disebabkan karena para investor kurang tertarik berinvestasi pada sektor pertanian. Rendahnya jumlah investasi tersebut juga bisa disebabkan kurangnya promosi untuk sektor pertanian.

Faktor keempat adalah pengeluaran pemerintah. Peningkatan pengeluaran pemerintah diharapkan mampu untuk memberikan stimulus bagi perekonomian, khususnya untuk sektor pertanian agar output yang dihasilkan petani meningkat. Upaya untuk meningkatkan output dibutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit, untuk itu dibutuhkan tenaga kerja baru untuk menghasilkan output pertanian.

Pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa modal untuk penyediaan sarana pertanian. Menurut UU RI No. 19 Tahun 2013 Pasal 19 dan 82 Tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani sarana produksi tersebut terdiri atas benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan serta alat dan mesin yang disediakan dengan harga yang terjangkau dan sesuai standar⁵. Nilai realisasi pengeluaran pemerintah pada sektor pertanian ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 1. 4 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian

Tahun	Pengeluaran Pemerintah (miliar)	Perkembangan pengeluaran pemerintah (dalam persen)
2010	8.016,1	4%
2011	15.986	99%
2012	18.247,1	14%
2013	15.931,3	-13%
2014	13.204,4	-17%
2015	15.879,3	20%

Sumber : Kementerian Keuangan

Berdasarkan tabel 1.5 tersebut dapat terlihat bahwa pada tahun 2010-2015 pengeluaran pemerintah sangat berfluktuasi. Pada tahun 2010 sebesar 4%.

⁵ UU RI No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani

Kemudian tahun 2011 terjadi peningkatan tajam sebesar 99%. Kemudian pengeluaran pemerintah berkembang melambat sebesar 14% pada tahun 2012. Peningkatan dalam pengeluaran pemerintah mulai mengecil pada tahun-tahun selanjutnya. Pada tahun 2013 pengeluaran pemerintah hanya menurun sebesar -13%. Lalu pada tahun 2014 pengeluaran pemerintah menurun sebesar -17%. Namun pada tahun 2015 pengeluaran pemerintah meningkat sebesar 20% dari tahun sebelumnya. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa besaran pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk sektor pertanian tiap tahunnya tumbuh namun cenderung melambat.

Memanfaatkan potensi sektor pertanian dengan meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang tersedia pada sektor pertanian di Indonesia dapat memaksimalkan output pada sektor pertanian. Dan dengan pemerintah menyediakan lahan pertanian yang cukup untuk mengoptimalkan sektor pertanian. Serta dibutuhkannya tambahan investasi. Sehingga tujuan pembangunan ekonomi dapat terealisasi dengan baik melalui sektor pertanian.

Berdasarkan faktor yang melatarbelakangi penyerapan tenaga kerja tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Pengaruh Upah, Investasi, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Pertanian di Indonesia”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya tenaga kerja yang bekerja pada sektor pertanian
2. Rendahnya jumlah lahan pertanian
3. Rendahnya kesejahteraan petani
4. Rendahnya tingkat upah buruh tani
5. Rendahnya tingkat investasi untuk sektor pertanian
6. Rendahnya perhatian pemerintah untuk sektor pertanian

C. Pembatasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang memiliki banyak aspek , dimensi, serta faktor-faktor yang sangat luas dan kompleks, maka peneliti membatasi masalah hanya pada “Pengaruh Upah, Investasi, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Pertanian di Indonesia”.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara Tingkat Upah Buruh Tani terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada sektor pertanian di Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh antara Investasi untuk Sektor Pertanian terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada sektor pertanian di Indonesia?

3. Apakah terdapat pengaruh antara Pengeluaran Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada sektor pertanian di Indonesia?
4. Apakah terdapat pengaruh antara upah, investasi, dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian di Indonesia?

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah referensi serta khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang Upah, Investasi, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Pertanian di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan untuk referensi penelitian selanjutnya tentang Upah, Investasi, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Pertanian di Indonesia.

BAB II

KAJIAN TEORETIK

A. Deskripsi Konseptual

1. Teori Migrasi

a. Teori Lewis

Lewis mengemukakan dua asumsi perihal sektor tradisional. Yang pertama adanya surplus tenaga kerja. Kedua, bahwasanya semua pekerja di daerah menghasilkan output yang sama sehingga tingkat upah riil di daerah pedesaan ditentukan oleh produktivitas tenaga kerja rata-rata, bukannya produktivitas tenaga kerja marginal⁶. Lewis mengasumsikan bahwa upah pada daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan sektor pedesaan, sehingga penyedia lapangan kerja di sektor modern bebas untuk merekrut tenaga kerja tenaga kerja di pedesaan tanpa perlu khawatir dengan tingkat upah.

b. Teori Todaro

Model migrasi Todaro melandaskan pada asumsi bahwa migrasi dari desa ke kota pada dasarnya merupakan suatu fenomena ekonomi, dimana terdapat perbedaan penghasilan yang diharapkan daripada penghasilan aktual antara desa-kota⁷. Artinya seseorang akan terus mengejar pendapatan

⁶ Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Jilid I Ed. Ketujuh*, (Jakarta: Erlangga, 2000), p. 134

⁷ Didit Purnomo, "Fenomena Migrasi Tenaga Kerja Dan Perannya Bagi Pembangunan Daerah Asal: Studi Empiris Di Kabupaten Wonogiri", *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 10, No.1, Juni 2009, p. 85

yang tinggi meskipun mereka mengetahui konsekuensi mereka dapat menganggur sewaktu-waktu.

2. Permintaan Tenaga Kerja

Pada umumnya, permintaan adalah suatu hubungan antara harga dan kuantitas. Permintaan tenaga kerja adalah suatu hubungan antara tingkat upah dan jumlah tenaga kerja yang diminta oleh pengusaha untuk dipekerjakan dalam perusahaannya. Sehingga terdapat perbedaan antara permintaan konsumen terhadap barang dan jasa dengan permintaan pengusaha atas tenaga kerja. Konsumen membeli/mengonsumsi barang dan jasa karena barang dan jasa tersebut memberikan kepuasan kepada konsumen. Sedangkan perusahaan akan menggunakan tenaga kerja sehingga keuntungan usaha yang diperoleh mencapai tingkat maksimal. Keuntungan tersebut akan tercapai apabila dipenuhi kondisi berikut:

$$VMPN = W$$

Dimana:

VMPN : Nilai produksi marginal yang dihasilkan oleh tenaga kerja N

W : Tingkat upah uang

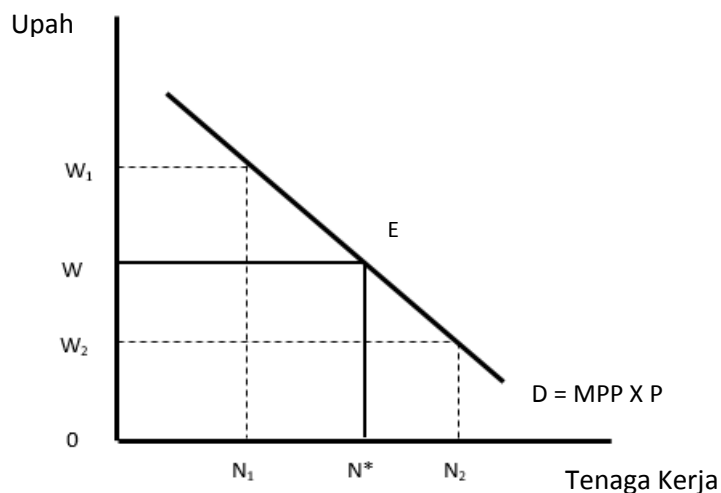
Persamaan tersebut menyatakan bahwa tenaga kerja akan digunakan oleh perusahaan guna mendapatkan keuntungan yang maksimal sampai dimana tenaga kerja yang terakhir memberikan produk fisik marginal (MPP) sebesar tingkat upah yang harus dibayar oleh perusahaan. Seperti yang dinyatakan dalam persamaan berikut:

MPP : Marginal Physical Product

P : Harga barang yang dihasilkan oleh tenaga kerja tersebut

Apabila perusahaan menghendaki laba maksimum yang menggunakan tenaga kerja, dapat secara riil dinyatakan bahwa produksi marginal harus sama dengan upah riil yaitu upah uang dibagi dengan tingkat harga atau indeks harga.

Sebuah kurva permintaan tenaga kerja dapat menggambarkan kuantitas maksimal pekerja yang akan dipekerjakan pada waktu tertentu pada berbagai tingkat upah.



Sumber: Payaman J. Simanjuntak

Gambar 2. 1 Kurva Permintaan Tenaga Kerja

Berdasarkan gambar 2.1 diatas kurva permintaan tenaga kerja menjelaskan hubungan antara tingkat upah dan jumlah tenaga kerja, kurva tersebut berslope negatif. Hal tersebut berarti apabila semakin tinggi tingkat upah yang diminta maka akibatnya terjadi penurunan jumlah tenaga kerja yang diminta. Sebaliknya apabila tingkat upah yang diminta rendah maka jumlah tenaga kerja yang diminta meningkat. Garis D menggambarkan

VMPN, apabila misalnya jumlah yang dipekerjakan sebanyak $ON_1 = 100$ orang, maka nilai hasil kerja orang yang ke 100 dinamakan VMPN dan besarnya sama dengan $MPPN \times P = W_1$. Nilai tersebut lebih besar daripada nilai upah yang sedang berlaku (W). Pengusaha dapat terus menambah laba perusahaan dengan mempekerjakan tenaga kerja baru hingga ON^* . Pada titik N pengusaha mencapai laba maksimum dari nilai $MPPN \times P$ sama dengan upah yang dibayarkan pada tenaga kerja. Hal ini berarti pengusaha mencapai laba maksimum apabila $MPPN \times P = W^8$.

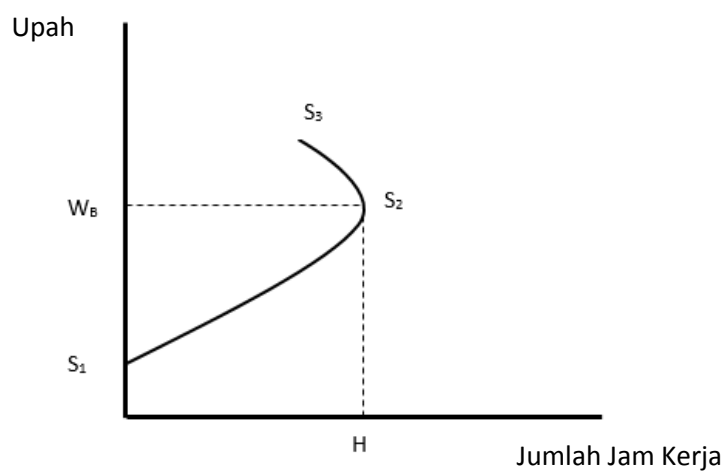
3. Penawaran Tenaga Kerja

Penawaran tenaga kerja adalah suatu hubungan antara tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan oleh pemilik tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja terdiri dari penawaran jangka pendek dan penawaran jangka panjang. Penawaran jangka pendek adalah suatu penawaran tenaga kerja dimana jumlah tenaga kerja keseluruhan yang ditawarkan bagi suatu perekonomian dapat dilihat sebagai hasil pilihan jam kerja dan pilihan partisipasi oleh individu. Sedangkan penawaran tenaga kerja jangka panjang merupakan konsep penyesuaian yang lebih lengkap terhadap perubahan-perubahan kendala. Penyesuaian-penyesuaian tersebut dapat berupa perubahan-perubahan partisipasi tenaga kerja maupun jumlah penduduk. Penawaran tenaga kerja sebagai akibat dari pertambahan jumlah

⁸ Payaman J. Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: FE UI Fakultas Ekonomi UI, 1998), p. 91

penduduk, pengangguran sehingga bertambahnya orang yang membutuhkan pekerjaan⁹.

Menurut teori Klasik, pekerja bebas mengambil keputusan untuk bekerja atau tidak. Bahkan pekerja juga bebas untuk menetapkan jumlah jam kerja yang diinginkannya. Teori ini didasarkan pada teori tentang konsumen, dimana setiap individu bertujuan untuk memaksimalkan kepuasan dengan kendala yang dihadapinya¹⁰.



Sumber: Payaman J. Simanjuntak

Gambar 2. 2 Kurva Penawaran Tenaga Kerja

Keterangan:

W_B : Tingkat upah pada harga tertentu

S_1 : Tingkat upah awal

S_2 : Titik potong

S_3 : Titik balik

H : Jumlah jam kerja seseorang pada waktu tertentu

⁹ Agustina Arida, Zakiah dan Julaini, "Analisis Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja Pada Sektor Pertanian di Provinsi Aceh", *Agrisep* Vol. 16 No. 1 2015, p. 69

¹⁰ *Ibid.*, p. 69

Kurva tersebut menggambarkan hubungan antara besarnya tingkat upah dengan jumlah jam kerja. Kurva tersebut memiliki slope positif. Artinya bahwa semakin tinggi upah yang ditawarkan maka jumlah tenaga kerja yang ditawarkan akan meningkat. Pada tingkat upah tertentu penyediaan waktu untuk bekerja seseorang bertambah bila tingkat upah bertambah (titik S_1S_2). Setelah mencapai upah tertentu (titik W_B), penambahan upah akan mengurangi waktu yang disediakan oleh individu untuk keperluan bekerja. Hal ini disebabkan adanya efek pendapatan yang mengalahkan efek substitusi. Dengan pendapatan yang lebih besar, seseorang cenderung akan lebih santai dalam bekerja. Kondisi ini mulai terjadi pada titik S_2S_3 . Titik S_2 disebut titik belok dan titik W_B disebut tingkat upah dimana titik penawaran berbelok. Tenaga kerja merupakan faktor input bagi produksi barang dan jasa oleh karena itu, kualitas dan kuantitas dari tenaga kerja merupakan faktor yang sangat penting dalam tingkat produksi dan tingkat pertumbuhan perekonomian Negara.

4. Penyerapan Tenaga Kerja

Sebelum membahas mengenai penyerapan tenaga kerja. Peneliti ingin memaparkan mengenai tenaga kerja. Tenaga kerja sendiri merupakan penduduk yang sedang berada dalam usia kerja. Berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 Bab I Ayat 2 mengenai Ketenagakerjaan disebutkan bahwa “tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna

menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat”¹¹.

Tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia untuk sanggup bekerja¹². Artinya setiap orang yang bersedia untuk bekerja untuk diri sendiri dinamakan tenaga kerja. Sedangkan DR. Payaman Simanjuntak menyatakan bahwa “tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga”¹³. Pernyataan tersebut mempertegas bahwa tenaga kerja digolongkan berdasarkan usia tertentu.

Dumairy dalam bukunya menyatakan bahwa tenaga kerja itu adalah penduduk yang digolongkan mempunyai umur di dalam batas usia kerja¹⁴. Sedangkan menurut Sitanggang dan Nachrowi, tenaga kerja adalah sebagian dari keseluruhan penduduk yang secara potensial dapat menghasilkan barang dan jasa¹⁵. Dari kedua kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja memiliki golongan usia tertentu yang bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa.

Menurut Badan Pusat Statistik, Tenaga kerja (manpower) adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (berusia 15 tahun atau lebih) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa¹⁶. Hal ini sejalan dengan

¹¹ Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Bab I ayat 2

¹² Sonny Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), p. 53

¹³ Payaman J. Simanjuntak, *op. cit.*, p.136

¹⁴ Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 1997), p. 54

¹⁵ Ignatia R. Sitanggang et al, “Pengaruh Struktural Ekonomi Pada Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral: Analisis Model Demometrik di 30 Provinsi Pada 9 Sektor di Indonesia”, *Jurnal ekonomi dan pembangunan Indonesia*, vol. 5 no. 1, p. 36

¹⁶ <http://www.datastatistik-Indonesia.com/content/view/801/801/> (diakses pada Senin, 13 Maret 2017, 12.30 WIB)

pendapat Mulyadi S yang menyatakan bahwa “tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu Negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut”¹⁷. Artinya setiap penduduk yang berusia 15-64 tahun yang bekerja dan atau berpartisipasi dalam memproduksi barang dan jasa disebut tenaga kerja.

Terdapat tiga golongan pekerja menurut BPS:

- 1) Buruh/Karyawan/Pegawai adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang.
- 2) Pekerja Bebas di pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha pertanian meliputi: pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan perburuan, termasuk jasa pertanian.
- 3) Pekerja Bebas di nonpertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1

¹⁷ Mulyadi S, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), p.59

majikan dalam sebulan terakhir) di usaha nonpertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha nonpertanian meliputi: usaha di sektor pertambangan, sektor industri, sektor listrik, gas dan air, sektor konstruksi/bangunan, sektor perdagangan, sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi, sektor keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan, sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan.

Berdasarkan kutipan-kutipan tersebut dapat disintesis bahwa tenaga kerja adalah individu yang sedang mencari atau sedang bekerja dan berpartisipasi untuk memproduksi barang dan jasa yang sudah memenuhi persyaratan atau batas usia yang telah ditetapkan dalam hal ini yaitu berusia 15-64 tahun.

Salah satu faktor produksi yang paling penting adalah Sumber Daya Manusia (tenaga kerja). Tenaga kerja sangat dibutuhkan untuk kegiatan produksi terutama untuk menghasilkan barang dan jasa. Tenaga kerja yang berkualitas dapat menentukan seberapa besar kualitas dari barang dan jasa yang dihasilkan. Dalam hal ini, dapat diketahui seberapa baik penyerapan tenaga kerja yang terjadi.

Pada dasarnya penyerapan tenaga kerja diartikan oleh Todaro dalam analisisnya tentang Negara dunia ketiga adalah jumlah pekerja yang telah

memperoleh pekerjaan secara permanen¹⁸. Sedangkan M. Taufik Zamrowi menyatakan bahwa, penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tertentu dari tenaga kerja yang digunakan dalam suatu unit usaha tertentu atau dengan kata lain penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terserap dan bekerja dalam suatu unit usaha¹⁹.

Berdasarkan kutipan diatas, dapat disintesis bahwa penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terserap pada suatu unit usaha dalam waktu tertentu.

5. Tingkat Upah

Upah memiliki peran penting bagi perusahaan, karena jumlah upah yang diberikan perusahaan kepada pekerja memiliki pengaruh yang tidak kecil bagi perusahaan. Upah yang dimaksud adalah balas jasa berupa uang yang diberikan lembaga atau organisasi perusahaan kepada pekerjanya. Dengan adanya upah, pekerja dapat menjaga semangat untuk mengerjakan pekerjaannya serta menjaga keberadaan pekerja tersebut untuk tetap berada dalam perusahaan. Salah satu bentuk penghargaan terhadap prestasi pekerja juga dapat diberikan perusahaan melalui upah.

Tingkat upah dapat mencerminkan tingkat produktivitas pekerja. Tingginya tingkat upah dalam perusahaan diharapkan dapat meningkatkan

¹⁸ Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Jilid I Ed. Ketujuh*, (Jakarta: Erlangga, 2000), p. 310

¹⁹ M. Taufik Zamrowi, analisis penyerapan tenaga kerja pada industri kecil 2007, p. 29 (http://eprints.undip.ac.id/15705/1/M_Taufik_Zamrowi.pdf (diakses pada Rabu, 15 Maret, 14.00 WIB))

produktivitas pekerja sehingga output perusahaan yang dihasilkan pekerja juga meningkat.

Terdapat pengertian upah yang disampaikan oleh Simanjuntak dalam Divianto, Simanjuntak menyatakan bahwa upah adalah bentuk balas jasa dari berbagai jasa yang diberikan oleh pemberi kerja untuk diterima para tenaga kerja. Sedangkan Mankiw menjelaskan bahwa upah dapat berupa uang yang dibayarkan kepada satu unit tenaga kerja sebagai kompensasi. Sedangkan menurut Sumarsono dalam Divianto upah adalah sebuah imbalan berupa uang termasuk tunjangan untuk karyawan itu sendiri yang jumlahnya telah ditetapkan dalam sebuah perjanjian kerja di dalam perundang-undangan yang dibayar oleh pemberi kerja²⁰. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upah merupakan imbal hasil dari setiap pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja dengan jumlah yang ditentukan dalam sebuah perjanjian khusus.

Definisi upah terdapat pula dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam Bab 1 pasal 1 ayat (30) yang berbunyi: “Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atau suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan

²⁰ Divianto, “Pengaruh Upah, Modal, Produktivitas, Dan Teknologi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Usaha Kecil-Menengah di Kota Palembang (Studi Kasus Usaha Percetakan)”, *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi*, Vol. 4 No. 1, Januari 2014, p. 50

dilakukan”²¹. Upah yang diterima pekerja dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu²²:

- 1) Upah uang. Upah uang adalah jumlah uang yang diterima para pekerja dari para pemberi kerja sebagai pembayaran ke atas tenaga mental atau fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi.
- 2) Upah riil. Upah riil adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja.

Berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Bab X bagian kedua mengenai Pengupahan, dijelaskan dalam pasal 88 bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Serta untuk mewujudkan penghasilan guna memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. Kebijakan tersebut terdiri atas kebijakan upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, bentuk dan cara pembayaran upah, denda dan potongan upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, struktur dan skala pengupahan yang

²¹ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 30

²² Dr. Nur Laily, M.Si dan Dr. Ec. Budiyo Pristiyadi, M.M, *Teori Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), p. 94

proporsional, upah untuk pembayaran pesangon, upah untuk perhitungan pajak penghasilan²³.

Pemerintah telah melakukan usaha untuk meningkatkan pendapatan pekerja melalui upah dengan menciptakan besaran upah minimum yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja. Pembagian upah minimum yang dijelaskan dalam pasal 89 ayat (1) terdiri atas:

- a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
- b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

Berdasarkan pasal 89 ayat (3) upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota. Hal ini serupa dengan pernyataan Tjiptoherijanto:

“Upah minimum adalah upah yang ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional maupun sub sektoral. Upah minimum ditetapkan melalui persetujuan dewan pengupahan yang terdiri dari Pemerintah, pemberi kerja dan Serikat Pekerja. Hal ini memiliki tujuan untuk memenuhi standar hidup minimum guna membiayai kebutuhan hidup tenaga kerja yang berpendapatan rendah”²⁴.

Kutipan di atas menjelaskan bahwa besarnya upah disetiap wilayah berbeda-beda, hal ini disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing yang telah disepakati oleh dewan pengupahan.

²³ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 88

²⁴ Paul SP Hutagalung dan Purbayu Budi Santosa, “Analisis Pengaruh Upah Minimum Dan Inflasi Terhadap Kesempatan Kerja Sektor Industri Pengolahan Besar dan Sedang di Jawa Tengah”, *Jurusan IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP*, Vol. 2, No. 4, Tahun 2013 ISSN : 2337-3814, p. 2

Upah minimum juga diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-01/Men/1999 menyatakan bahwa upah minimum merupakan upah bulanan terendah yaitu upah pokok serta tunjangan tetap. Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud adalah jumlah imbalan yang pembayarannya tetap dan teratur yang dapat dilihat berdasarkan tingkat kehadiran serta prestasi tertentu yang diraih. Mewujudkan penghasilan yang layak untuk para pekerja merupakan tujuan dari di tetapkannya upah minimum. Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat beberapa pertimbangan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan kondisi ekonomi secara umum²⁵.

Todaro menyatakan bahwa upah cenderung turun dan tidak pernah fleksibel karena terdapat berbagai hal yang mempengaruhi misalnya dari kekuatan institusional seperti tekanan baik dari serikat dagang maupun serikat buruh²⁶. Pendapat Todaro tersebut sejalan dengan Pemikiran ahli ekonomi Klasik sebagai berikut:

“Pendapat para ahli ekonomi Klasik pada perekonomian modern menyatakan bahwa tingkat upah sulit menurun. Hal ini terjadi karena pada perekonomian tersebut terdapat kelompok pekerja yang selalu berjuang mempertahankan nasibnya dengan menuntut pemberian upah yang wajar bagi para pekerja. Setiap kebijakan yang dibuat untuk menurunkan tingkat upah selalu ditentang. Dengan demikian tingkat pengangguran juga mengalami peningkatan”²⁷.

Menurunnya jumlah tenaga kerja membuat penawaran akan tenaga kerja menurun, sedangkan upah akan mengalami kenaikan. Kenaikan ini

²⁵ *Ibid.*, p. 2

²⁶ Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Jilid I Ed. Ketujuh*, (Jakarta: Erlangga, 2000), p. 327

²⁷ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi Ed. Ketiga*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), p. 84

terjadi pada saat jumlah penduduk konstan. Hal tersebut sering dikenal dengan istilah hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang (*the law of diminishing returns*)²⁸.

Berdasarkan teori diatas, dapat di sintesiskan bahwa upah adalah balas jasa yang diberikan oleh pemberi kerja kepada penerima kerja atas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh penerima kerja yang jumlahnya telah ditetapkan dalam sebuah perjanjian kerja.

6. Investasi

Investasi atau yang lebih sering dikenal dengan penanaman modal adalah pengeluaran atau perbelanjaan penanaman modal untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi guna menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa di masa akan datang. Adakalanya penanaman modal dilakukan untuk menggantikan barang-barang modal yang lama dan perlu didepresiasi²⁹.

Dornbusch, Fisher dan Startz, menyatakan bahwa investasi adalah tambahan pengeluaran yang ditunjukkan untuk meningkatkan atau mempertahankan stok barang modal yang digunakan dalam proses produksi. Stok barang modal (capital stoks) ini terdiri dari pabrik, mesin kantor dan produk-produk tahan lama lainnya³⁰.

²⁸ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Ed. Kelima*, (Yogyakarta: STIM YKPN, 2010) p. 80

²⁹ Sadono Sukirno. *op. cit*, p.121

³⁰ Rudiger Dornbusch, Fisher, dan Startz, *Makroekonomi*, (Mc Graw Hill, 2015), p. 223

Peran investasi sangat penting bagi perekonomian terutama bagi Negara yang sedang berkembang. Dengan adanya tambahan investasi akan memunculkan kegiatan produksi. Semakin tingginya kegiatan produksi maka akan membutuhkan tambahan pekerja, semakin banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan artinya semakin tinggi pula penyerapan tenaga kerja.

Investasi sama artinya dengan penanaman modal. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007 pasal 1 menyatakan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Dalam pasal 3 disebutkan pula bahwa penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri³¹.

Istilah investasi sering terdengar dalam dunia ekonomi. Pengertian investasi memiliki dua arti yaitu³²:

1. *Induced investment* atau investasi yang terjadi secara tidak langsung, yaitu investasi yang mempunyai kaitan dengan tingkat

³¹ UU No. 25 Tahun 2007

³² Rudi Sofia Sandika, Rudi Sofia Sandika, Yusni Maulida, dan Deny Setiawan, "Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Pelalawan", *JOM FEKON* 1. No. 2 Oktober 2014, p. 5

pendapatan atau karena terjadinya pertambahan permintaan efektif.

2. *Autonomous investment*, yaitu investasi yang tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, misalnya investasi pada rehabilitasi prasarana jalan dan irigasi. Investasi jenis ini biasanya lebih banyak dilakukan oleh sektor pemerintah, karena investasi ini akan menyangkut banyak aspek sosial budaya yang ada di masyarakat.

Tujuan investasi terdapat dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 pasal 3, antara lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat³³. Dengan banyaknya tujuan yang dimiliki tersebut, sangatlah penting untuk meningkatkan iklim investasi.

Mankiw menyatakan bahwa investasi terdiri dari barang-barang yang dibeli untuk penggunaan masa depan. Investasi dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu *business fixed investment*, *residential investment*, dan *inventory investment*. *Business fixed investment* mencakup peralatan dan sarana yang dibeli perusahaan untuk digunakan dalam proses produksinya, sementara *residential investment* meliputi pembelian rumah baru, baik yang

³³ Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 pasal 3

akan dihuni oleh pemilik itu sendiri maupun yang akan disewakan, sedangkan *inventory investment* adalah barang yang disimpan oleh perusahaan di gudang, meliputi bahan baku, persediaan, bahan setengah jadi, dan barang jadi³⁴.

Pada suatu tahun tertentu, untuk mencatat nilai penanaman modal yang dilakukan, pengeluaran/pembelanjaan yang digolongkan sebagai investasi adalah sebagai berikut:³⁵

1. Pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan.
2. Pembelanjaan untuk membangun rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik dan bangunan-bangunan lainnya.
3. Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional.

Terdapat banyak pertimbangan yang dilakukan seseorang memutuskan untuk berinvestasi. Menurut Sukirno, faktor-faktor utama yang mempengaruhi tingkat investasi yaitu:³⁶

1. Tingkat keuntungan investasi yang diramalkan akan diperoleh.
2. Tingkat bunga.
3. Ramalan mengenai keadaan ekonomi dimasa depan.
4. Kemajuan teknologi.
5. Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya.
6. Keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan.

³⁴ N. Gregory Mankiw, *Teori Makroekonomi Edisi Kelima*, (Jakarta: Erlangga, 2003), p. 453

³⁵ Sadono Sukirno, *op. cit.*, p.121

³⁶ *Ibid.*, p.128

Apabila dikaitkan dengan penyerapan tenaga kerja, investasi memiliki pengaruh yang tidak sedikit. Hal ini disampaikan oleh Tambunan yang menyatakan bahwa Investasi sangat erat kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja. Dengan adanya investasi akan mendorong munculnya proses produksi (output), dimana output tersebut dihasilkan oleh beberapa tenaga kerja. Dengan demikian terciptalah kesempatan kerja baru yang akan menyerap tenaga kerja dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat akan menambah tabungan yang dimiliki masyarakat, yang kemudian akan mendorong peningkatan investasi disebabkan oleh bunga bank yang cukup rendah sehingga banyak investor menginvestasikan modalnya ke sektor ekonomi³⁷.

Pandangan yang sama terkait investasi dengan penyerapan tenaga kerja disampaikan pula oleh Thomas yang menyatakan bahwa:

“Investasi sangat penting dan erat kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja. Dengan adanya investasi-investasi baru maka barang modal baru akan tercipta sehingga akan menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan kerja baru atau kesempatan kerja baru yang akan menyerap tenaga kerja yang berkompeten dan berkualitas dan pada akhirnya akan berdampak dalam peningkatan pendapatan masyarakat”³⁸.

Kutipan di atas menyatakan dengan jelas tentang pentingnya investasi bagi penyerapan tenaga kerja. Dengan investasi yang tinggi maka

³⁷ Lailan Safina dan Sri Endang Rahayu, “Analisis Pengaruh Investasi Pemerintah dan Swasta Terhadap Penciptaan Kesempatan Kerja di Sumatera Utara”, *Jurnal Manajemen & Bisnis*, Vol 11 No. 01, April 2011, p.2

³⁸ I B Km. Adi Sutrisna Manuaba, dan I Nengah Kartika, “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja Melalui Pendidikan”, *E-Jurnal Ep Unud*, Vol. 5 No.9, September 2016 ISSN: 2303-0178, p. 973

penyerapan juga akan tinggi, sehingga pengangguran akan berkurang. Investasi harus terus bertambah karena investasi merupakan tambahan modal untuk menjalankan perekonomian.

Berdasarkan teori diatas, dapat disintesisikan bahwa investasi adalah pembentukan modal baik berasal dari dalam negeri (PMDN) maupun luar negeri (PMA) yang digunakan untuk membeli barang-barang modal baru agar meningkatnya kemampuan memproduksi barang dan jasa di masa yang akan datang.

7. Pengeluaran Pemerintah

Dalam mengelola perekonomian, dibutuhkan peran pemerintah di dalamnya. Pengeluaran pemerintah dapat didefinisikan sebagai penggunaan uang dan sumber daya dalam suatu Negara guna membiayai kegiatan Negara atau pemerintah agar fungsinya dalam melakukan kesejahteraan terwujud. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat³⁹.

Guritno dalam Elvandry menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah⁴⁰. Dengan demikian, jika pemerintah menetapkan suatu kebijakan untuk Negara maka

³⁹ Detri Karya, *Makroekonomi Pengantar untuk Manajemen Ed. Pertama*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), p. 179

⁴⁰ Elvandry Tandiawan, Amran Naukoko dan Patrick Wauran, "Pengaruh Investasi Swasta dan Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kesempatan Kerja di Kota Manado Tahun 2001-2012", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Vol. 15 No. 01 tahun 2015, p. 185

dalam pelaksanaannya, dana yang dikeluarkan tersebut dinamakan pengeluaran pemerintah.

Peran pemerintah sangat besar untuk menentukan roda perekonomian, hal ini dapat dilihat dari besaran pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan ekonomi. Pemerintah sangat berhati-hati dan memperhitungkan betul dalam hal memperbesar pengeluaran pemerintah yang dikeluarkannya, sebab jika hal itu tidak dilakukan dengan hati-hati maka akan terdapat pihak yang terkena imbas dari kebijakan yang dibuat pemerintah.

Pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pengeluaran agregat selain fungsinya yaitu mengatur kegiatan ekonomi Negara⁴¹. Dalam perekonomian, pengeluaran agregat dapat dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu, konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah dan ekspor⁴².

Berdasarkan PERMENDAGRI No. 13 tahun 2006 Pasal 26 dan 50, pengeluaran pemerintah daerah terdiri dari dua golongan yaitu:⁴³

1. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan secara langsung terkait adanya kegiatan yang direncanakan. Jenis belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja barang modal.

⁴¹ Sadono Sukirno. *op. cit.*, p. 87

⁴² *Ibid*, p. 101

⁴³ PERMENDAGRI No. 13 tahun 2006

2. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan secara tidak langsung terkait adanya program dan kegiatan. Jenis belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Pemerintah dalam menjalankan perekonomian memiliki beberapa fokus utama dalam menganggarkan kegiatannya, baik untuk publik maupun daerah. Apabila pemerintah merencanakan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi angka pengangguran, maka pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya. Pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menjadi dua klasifikasi, yaitu⁴⁴ :

1. Pengeluaran rutin. Pengeluaran rutin yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan pemerintah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi dan pengeluaran rutin lainnya. Melalui pengeluaran rutin, pemerintah dapat menjalankan misinya dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintah, kegiatan operasional dan pemeliharaan asset Negara.
2. Pengeluaran pembangunan. Pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran yang digunakan untuk membiayai pembangunan di bidang ekonomi, social dan umum dan yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan, baik prasarana fisik maupun non fisik yang dilaksanakan dalam periode tertentu. Anggaran pembangunan secara fisik maupun non fisik selalu disesuaikan dengan dana yang dimobilisasi. Dana ini kemudian di

⁴⁴ Sri Endang Rahayu, "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara", *Jurnal Manajemen & Bisnis*, Vol 11 No. 02, Oktober 2011 ISSN 1693-7619, p. 129

alokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan⁴⁵.

Menurut Boediono pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama sebagai berikut⁴⁶:

- a. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa
- b. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai
- c. Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment

Sukirno menyatakan bahwa ada banyak faktor yang terdapat dalam jumlah pengeluaran pemerintah dalam satu periode, yaitu jumlah pajak yang akan diterima, tujuan-tujuan kegiatan ekonomi jangka pendek dan pembangunan ekonomi jangka panjang, dan pertimbangan politik dan keamanan⁴⁷.

Pengeluaran pemerintah dipakai sebagai indikator untuk menentukan besarnya kegiatan pemerintah yang didanai oleh pengeluaran pemerintah. Besarnya pengeluaran pemerintah mencerminkan banyaknya kegiatan pemerintah yang bersangkutan. Semakin besar pengeluaran pemerintah maka semakin besar dan banyak pula kegiatan yang dilakukan pemerintah⁴⁸. Sehingga Semakin besar pengeluaran pemerintah maka semakin besar pula peranan pemerintah yang tercermin dalam pendapatan nasional di suatu Negara.

⁴⁵ Elysabeth Dinauli dan Freddy Wangke, “Pengaruh Upah Tenaga Kerja dan Investasi Pemerintah terhadap penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia than 1996-2008”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Indonesia Atmajaya 1 Februari 2013*, p.15

⁴⁶ Detri Karya. *op. cit.*, p. 180

⁴⁷ *Ibid.*, p. 168

⁴⁸ *Ibid.*, p. 180

Pengeluaran pemerintah akan selalu meningkat, hal ini disebabkan oleh lima penyebab yang dikemukakan oleh Wagner yaitu: tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan demokrasi dan ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintah⁴⁹.

Pendapat Keynes yaitu, penggunaan tenaga kerja penuh tidak selalu tercipta dalam sistem pasar bebas sehingga perlu dilakukan usaha dan kebijakan pemerintah untuk menciptakan penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi yang teguh⁵⁰. Salah bentuk campur tangan yang dapat dilakukan Keynes adalah dengan menjalankan kebijakan fiskal. Keynes mengisyaratkan kebijakan fiskal yang ekspansif melalui pengurangan pajak dan penambahan pengeluaran pemerintah (Government Expenditure)⁵¹. Menurut Keynes, kenaikan belanja pemerintah adalah untuk mengatasi pengangguran atau meningkatkan tenaga kerja, seperti perekrutan pegawai negeri sipil, polisi, militer dan meningkatkan kesempatan kerja di sektor swasta⁵².

Pendapat yang dikemukakan oleh Keynes dalam kutipan di atas, peningkatan pengeluaran pemerintah dan pengurangan pajak akan menyebabkan permintaan efektif bertambah. Kenaikan permintaan efektif

⁴⁹ Sri Endang Rahayu, *op. cit.*, p. 128

⁵⁰ Sadono Sukirno, *op. cit.*, p. 23

⁵¹ Zulhanafi, Hasdi Aimon, Efrizal Syofyan, *op. cit.*, p. 86-87

⁵² Matius Irsan Kasau, *et. al.*, "Effect Of Government Spending On Employment Through Investment And Its Impact On The Eastern And Western Indonesia", *International Journal Of Research In Social Sciences*, July 2015. Vol. 5 No.5 ISSN 2307-227x, p. 62

(permintaan terhadap barang dan jasa) tersebut akan meningkatkan konsumsi output (barang dan jasa). Dengan demikian permintaan terhadap barang dan jasa bertambah, dengan kenaikan tersebut para pengusaha memperluas produksi. Perluasan produksi ini membutuhkan tenaga kerja baru yang artinya penyerapan tenaga kerja akan meningkat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disintesis bahwa pengeluaran pemerintah adalah uang yang digunakan atau dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah baik oleh pemerintah pusat melalui APBN maupun pemerintah daerah melalui APBD dalam jangka waktu satu tahun anggaran.

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

Penelitian mengenai penyerapan tenaga kerja telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Terdapat beberapa variabel independen (bebas) yang terbukti mempengaruhi penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dimas dan Nenik Woyanti yang berjudul “Penyerapan Tenaga Kerja di DKI Jakarta” menunjukkan hasil bahwa secara parsial, variabel PDRB, tingkat upah riil dan investasi riil berpengaruh secara signifikan pada derajat satu persen terhadap penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta. Nilai koefisien menunjukkan bahwa apabila PDRB meningkat sebesar satu persen maka penyerapan tenaga kerja meningkat 1,23 persen. Jika upah meningkat satu persen maka akan menurunkan penyerapan

tenaga kerja sebesar 0,20 persen. Jika investasi naik sebesar satu persen maka akan menurunkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,44 persen⁵³.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rudi Sofia Sandika, Yusni Maulida, Deny Setiawan yang berjudul “Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Pelalawan” menunjukkan hasil bahwa investasi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Pelalawan tahun 2003-2012. Variasi perubahan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Pelalawan tahun 2003-2012 yang dipengaruhi oleh investasi adalah sebesar 9,8 persen⁵⁴.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Matius Irsan Kasau, *et. al.* yang berjudul “*Effect Of Government Spending On Employment Through Investment and Its Impact On The Eastern And Western Indonesia*” menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh positif antara Pengeluaran Pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Jika belanja pemerintah meningkat sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,16 persen di Kawasan Barat Indonesia dan 0,35 persen di Kawasan Timur Indonesia⁵⁵.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Elysabeth Danauli dan Freddy Wangke yang berjudul “Pengaruh Upah Tenaga Kerja dan Investasi Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia” menunjukkan hasil bahwa variabel upah dan variabel investasi pemerintah berpengaruh

⁵³ Dimas dan Nenik Woyanti, , “Penyerapan Tenaga Kerja di DKI Jakarta”, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol. 16, No.1, Maret 2009, ISSN: 1412-3126, p. 32-41

⁵⁴ Rudi Sofia Sandika, Rudi Sofia Sandika, Yusni Maulida, dan Deny Setiawan, *op. cit.*, p.1-16

⁵⁵ Matius Irsan Kasau, *et. al.*, *op. cit.*, p. 55-64

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dengan koefisien determinasi sebesar 0,973307⁵⁶.

C. Kerangka Teoretik

1. Tingkat Upah dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Upah merupakan hal yang penting baik bagi pekerja maupun perusahaan, karena upah memiliki pengaruh yang sangat besar bagi pekerja. Upah juga salah satu pengukur kesejahteraan. Seseorang yang memiliki upah tinggi sering diartikan memiliki kesejahteraan yang baik. Dalam sebuah Negara, peran pemerintah sangat besar dalam mengatur besaran upah.

Menurut teori Keynes, Keynes memandang penyerapan tenaga kerja dari segi permintaan. Serta wujud dari permintaan tidak selalu keadaan *full employment*. Keterkaitan upah dengan penyerapan tenaga kerja juga disampaikan oleh Mujarad Kuncoro. Kenaikan tingkat upah dapat menyebabkan menurunnya jumlah tenaga kerja yang diminta. Jika tingkat upah naik sementara harga input lain tetap, membuat harga tenaga kerja cenderung mahal dari input. Guna mempertahankan keuntungan yang maksimum, pemberi kerja meminimalkan penggunaan tenaga kerja yang mahal dengan input yang memiliki harga lebih murah⁵⁷.

⁵⁶ Elysabeth Danauli dan Freddy Wangke, *op. cit.* p. 11-21

⁵⁷ Paul SP Hutagalung dan Purbayu Budi Santosa, *op. cit.*, p. 2

2. Investasi dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Investasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Munculnya investasi akan mendorong munculnya proses produksi (output) dan output yang dihasilkan oleh pekerja. Semakin tinggi proses produksi menandakan seberapa besar aktivitas perekonomian sebuah Negara. Dengan adanya kegiatan produksi maka akan dibutuhkan tambahan pekerja baru yang kemudian akan menambah jumlah tenaga kerja.

Dalam teori Harrod-Domar, pembentukan modal tidak hanya dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga akan meningkatkan permintaan efektif⁵⁸.

Menurut Keynes dalam model multipliernya, Keynes menyebutkan bahwa peningkatan jumlah investasi swasta akan memperluas output dan penggunaan tenaga kerja. Menurutnya untuk mempertahankan keadaan *full employment* dibutuhkan investasi. Sedangkan menurut Tambunan kenaikan investasi dapat menyebabkan kenaikan pendapatan. Dengan meningkatnya jumlah pendapatan, maka masyarakat akan cenderung untuk menabung yang kemudian akan mendorong pada peningkatan investasi akibat rendahnya bunga bank⁵⁹. Dengan demikian peningkatan investasi akan membuat bertambahnya proyek baru yang kemudian akan mendorong munculnya tenaga kerja baru yang akan terserap.

⁵⁸ Lincoln Arsyad, *op. cit.*, p. 83-84

⁵⁹ Lailan Safina dan Sri Endang Rahayu, *op. cit.*, p. 2

3. Pengeluaran Pemerintah dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Pemerintah berperan untuk mengatur jalannya perekonomian melalui penentuan besar dan kecilnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang tercermin dalam APBN dan APBD. Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah untuk menstabilkan harga, tingkat output maupun penyerapan tenaga kerja. Tinggi rendahnya penyerapan tenaga kerja dapat ditentukan dari besar dan kecilnya pengeluaran pemerintah yang diberikan⁶⁰.

Keterkaitan antara pengeluaran pemerintah dengan penyerapan tenaga kerja ini dikemukakan oleh Keynes. Menurut Keynes, pemerintah memiliki peranan penting dalam perekonomian, karena pemerintah memiliki kuasa untuk membuat suatu kebijakan, misalnya kebijakan untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah dan pengurangan pajak. Peningkatan pengeluaran pemerintah dan pengurangan pajak akan menyebabkan permintaan efektif bertambah. Kenaikan permintaan efektif (permintaan terhadap barang dan jasa) tersebut akan meningkatkan konsumsi output (barang dan jasa). Dengan demikian permintaan terhadap barang dan jasa bertambah, dengan kenaikan tersebut para pengusaha memperluas produksi. Perluasan produksi ini membutuhkan tenaga kerja baru yang artinya penyerapan tenaga kerja akan meningkat.

⁶⁰ Sadono Sukirno. *op. cit.*, p. 101

D. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan kerangka teoretik di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut “terdapat pengaruh antara tingkat upah, investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja” sehingga:

1. Terdapat pengaruh yang negatif antara upah terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian di Indonesia
2. Terdapat pengaruh yang positif antara investasi terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian di Indonesia
3. Terdapat pengaruh yang positif antara pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian di Indonesia
4. Terdapat pengaruh antara upah, investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian di Indonesia

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah-masalah yang peneliti rumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat (sahih, benar, valid) dan dapat dipercaya (dapat diandalkan reliable) bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh upah terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian di Indonesia
2. Mengetahui pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian di Indonesia
3. Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian di Indonesia
4. Mengetahui pengaruh upah, investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian di Indonesia

B. Obyek dan Ruang Lingkup Penelitian

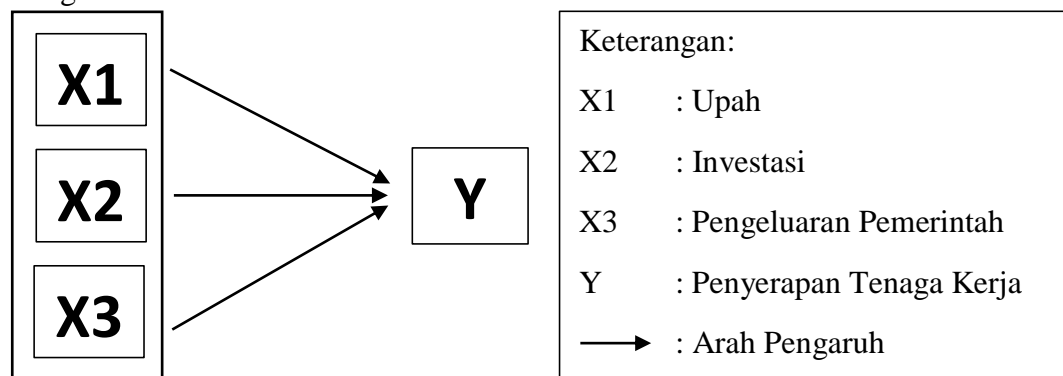
Obyek dalam penelitian ini adalah Indonesia, karena Indonesia merupakan Negara agraris yang memiliki potensi yang besar dalam sektor pertanian terutama sebagai penyumbang perekonomian. Namun setelah adanya transformasi sektor ekonomi, mayoritas tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian menurun.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Ex Post Facto*. Penelitian *ex post facto* adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian meruntut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Metode ini dipilih untuk menggambarkan dan mencari pengaruh antara dua variabel atau lebih serta mengukur seberapa besar atau seberapa erat pengaruh antara variabel yang diteliti, yaitu pengaruh upah, investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian di Indonesia⁶¹.

D. Konstelasi Hubungan antar Variabel

Dalam penelitian ini terdapat empat variabel yang menjadi objek penelitian dimana penyerapan tenaga kerja sektor pertanian merupakan variabel terikat, sedangkan yang menjadi variabel bebas adalah upah, investasi dan pengeluaran pemerintah. Konstelasi pengaruh antar variabel dapat digambarkan sebagai berikut:



⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Alfabeta, 2004), p. 7

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif yaitu data yang telah tersedia dalam bentuk angka. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dengan menggabungkan data *time series* (rentang waktu) dan *cross section* (data silang). Dalam penelitian ini data yang digunakan yaitu data 10 propinsi tahun 2012-2015 pada wilayah barat Indonesia, karena wilayah tersebut merupakan wilayah yang subur dan mayoritas tenaga kerja bekerja pada sektor pertanian. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini berasal dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian (Pusdatin Kementan), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Kementerian Keuangan. Sebagai pendukung, peneliti menggunakan buku referensi, jurnal, surat kabar, serta browsing website internet mengenai penyerapan tenaga kerja.

F. Operasionalisasi Variabel Penelitian

1. Penyerapan Tenaga Kerja

a. Definisi Konseptual

Penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terserap pada suatu unit usaha dalam waktu tertentu.

b. Definisi Operasional

Penyerapan tenaga kerja adalah orang yang terserap untuk bekerja pada unit usaha tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Dalam

penelitian ini, penyerapan tenaga kerja diukur menggunakan tenaga kerja yang terserap pada sektor pertanian.

2. Tingkat Upah

a. Definisi Konseptual

Upah adalah balas jasa yang diberikan oleh pemberi kerja kepada penerima kerja atas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh penerima kerja yang jumlahnya telah ditetapkan dalam sebuah perjanjian kerja.

b. Definisi Operasional

Upah adalah upah/gaji bersih yang biasanya diterima selama sebulan oleh buruh baik berupa uang atau barang yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Dalam penelitian ini, upah yang diukur adalah upah minimum sektor pertanian berupa uang yang besarnya sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan, dan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah diselesaikan.

3. Investasi

a. Definisi Konseptual

Investasi adalah pembentukan modal baik berasal dari dalam negeri (PMDN) maupun luar negeri (PMA) yang digunakan untuk membeli barang-barang modal baru seperti peralatan, mesin-mesin baru

untuk menambah dan atau mengganti barang-barang modal yang sudah ada yang digunakan untuk kegiatan produksi.

b. Definisi Operasional

Investasi adalah pengeluaran sumber dana dengan mengharapkan keuntungan dimasa yang akan datang. Investasi yang diukur adalah nilai realisasi PMDN dan PMA sektor pertanian, yang bersumber dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia.

4. Pengeluaran Pemerintah

a. Definisi Konseptual

Pengeluaran pemerintah adalah uang yang digunakan atau dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah baik oleh pemerintah pusat melalui APBN maupun pemerintah daerah melalui APBD dalam jangka waktu satu tahun anggaran.

b. Definisi Operasional

Pengeluaran pemerintah yang diukur adalah nilai realisasi pengeluaran pemerintah yang mencakup seluruh belanja pemerintah untuk sektor pertanian yang diperoleh dari Kementerian Keuangan RI.

G. Teknik Analisis Data

1. Analisis Data Panel

Regresi adalah sebuah studi bagaimana variabel dependen dipengaruhi oleh satu atau lebih dari variabel independen dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi nilai rata-rata dependen didasarkan pada nilai variabel independen yang diketahui⁶². Untuk mengetahui hubungan secara kuantitatif dari tiga variabel atau lebih yakni upah, investasi dan pengeluaran pemerintah. Persamaan Regresi yang digunakan sebagai berikut⁶³:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y : Penyerapan Tenaga Kerja (variabel terikat)
- β_0 : Koefisien titik potong intersep
- β_1 : Koefisien tingkat Upah
- β_2 : Koefisien Investasi
- β_3 : Koefisien Pengeluaran Pemerintah
- X_1 : Upah (variabel bebas)
- X_2 : Investasi (variabel bebas)
- X_3 : Pengeluaran Pemerintah (variabel bebas)
- e : Error/disturbance (variabel pengganggu)

Model tersebut dapat ditransformasikan kedalam persamaan logaritma :

$$\ln Y = \beta_0 + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \beta_3 \ln X_3 + \mu$$

Keterangan:

- Y : Penyerapan Tenaga Kerja
- β_0 : Konstanta

⁶² Agus Widarjono, *Ekonometrika*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013), p. 7

⁶³ Damodar N. Gujarati, *Dasar-dasar Ekonometrika*, (Jakarta: Erlangga, 2006), p. 122

X1	: Upah
X2	: Investasi
X3	: Pengeluaran Pemerintah
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien yang dicari untuk mengukur pengaruh variabel X1, X2 dan X3
μ	: Kesalahan pengganggu
Ln	: Logaritma natural

Pemilihan model ini didasarkan pada penggunaan model logaritma natural (Ln) untuk memperkecil penyimpangan dalam asumsi OLS yaitu heterokedastisitas.

Penelitian ini menggunakan data panel, sehingga regresi dengan menggunakan data panel disebut model regresi data panel. Secara umum dengan menggunakan data panel akan menghasilkan intersep dan slope koefisien yang berbeda pada setiap objek dan setiap periode waktu. Regresi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan logaritma natural (Ln) pada setiap nilai data yang digunakan, baik data variabel terikat maupun variabel bebasnya.

Analisis regresi dengan data panel dapat dilakukan dalam beberapa langkah, yaitu :

- a. Estimasi data panel dengan hanya mengombinasikan data time series dan cross section dengan menggunakan metode OLS sehingga dikenal dengan estimasi *common effect*. Pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu dan waktu.
- b. Estimasi data panel dengan menggunakan *fixed effect*, di mana metode ini mengasumsikan bahwa individu atau objek memiliki intersep yang

berbeda, tetapi memiliki slope regresi yang sama. Suatu objek memiliki intersep yang sama besar untuk setiap perbedaan waktu demikian juga dengan koefisien regresinya yang tetap dari waktu ke waktu (*time invariant*). Untuk membedakan antara individu dan individu lainnya digunakan variabel dummy (variabel contoh/semu) sehingga metode ini sering juga disebut *least square dummy variables* (LSDV).

c. Estimasi data panel dengan menggunakan metode *random effect*. Metode ini tidak menggunakan variabel dummy, tetapi menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar individu. Model *random effect* mengasumsikan bahwa setiap variabel mempunyai perbedaan intersep, tetapi intersep tersebut bersifat random atau stokastik. Metode *generalized square* (GLS) digunakan untuk mengestimasi model regresi ini sebagai pengganti metode OLS.

2. Memilih Model Terbaik dalam Regresi Data Panel

Dalam menentukan model terbaik, digunakan Uji Chow untuk menentukan antara model *common effect* dan *fixed effect* yang paling tepat untuk mengestimasi data panel.

Hipotesis dalam Uji Chow:

H_0 : Model Common Effect

H_1 : Model Fixed Effect

Dasar penolakan terhadap hipotesis di atas adalah membandingkan perhitungan F-stat dengan F-tabel. Perbandingan dipakai apabila hasil F hitung lebih besar (\geq) dari F tabel maka H_0 ditolak yang berarti model yang paling tepat digunakan adalah Model *Fixed Effect*. Apabila F hitung lebih kecil (\leq) dari F tabel maka H_0 diterima maka model yang digunakan adalah Model *Common Effect*. Perhitungan F statistik didapat dari Uji Chow⁶⁴ dengan rumus berikut.

$$F = \frac{SSE - SS2 / (n - 1)}{(SSE2) / -(nT - n - k)}$$

Keterangan:

SSE1 = Sum Square Resid dari model *Common Effect*

SSE2 = Sum Square Resid dari model *Fixed Effect*

n = Jumlah data

nT = Jumlah data cross section x jumlah rentang time series

k = Jumlah variabel independen

Nilai F statistik \geq F tabel, maka H_0 ditolak yang berarti model yang lebih tepat digunakan adalah Model *Fixed Effect*. Setelah Uji Chow dilakukan, selanjutnya Uji Hausman untuk menentukan antara Model *Fixed Effect* atau Model *Random Effect*. Jika nilai probability pada tes *cross section and period random effects* menunjukkan angka $> 0,05$ yang berarti tidak signifikan dengan tingkat 95% atau $\alpha=5\%$. Sehingga keputusan yang

⁶⁴ Badi, H. Baltagi, *Econometric Analysis of Panel Data*. (England: John Wiley & Sons, Ltd, 2005), p.13

diambil berdasarkan Uji Hausman ini adalah terima H_0 ($p\text{-value} \geq 0,05$) dengan hipotesis:

H_0 : Model Random Effect

H_1 : Model Fixed Effect

Setelah dilakukan Uji Hausman, maka dapat ditentukan model apa yang paling tepat untuk digunakan dalam persamaan regresi linier berganda.

3. Deteksi Asumsi Klasik

Uji asumsi Klasik dipergunakan agar hasil estimasi memenuhi persyaratan *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) yaitu pada model tidak terdapat multikolonearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Uji asumsi Klasik terdiri dari deteksi normalitas, deteksi heteroskedastisitas, deteksi multikolinearitas, dan deteksi autokorelasi.

a. Deteksi Normalitas

Deteksi normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah residual berdistribusi normal atau tidak. Deteksi normalitas residual metode OLS secara formal dapat dideteksi dari metode yang dikembangkan oleh Jarque-Bera (JB). Uji statistik dari J-B ini menggunakan perhitungan *skewness* dan *kurtosis*.

Adapun formula uji statistik J-B adalah sebagai berikut:

$$JB = \frac{n}{6} \left[S^2 + \frac{(K-3)^2}{4} \right]$$

Keterangan:

n : ukuran sampel

S : menyatakan kemencengan (*skewness*)

K : menyatakan keruncingan (*kurtosis*)

Dengan hipotesis:

H_0 : Error berdistribusi normal

H_1 : Error tidak berdistribusi normal

Jika hasil perhitungan menunjukkan $p\text{-value}$ Jarque Bera $> 0,05$ maka H_0 diterima, artinya error berdistribusi normal⁶⁵.

b. Deteksi Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heterokedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi.

Hipotesis:

H_0 : Varians error bersifat homoskedastisitas

H_1 : Varian error bersifat heterokedastisitas

Untuk mengetahui apakah hasil estimasi mempunyai masalah heterokedastisitas atau tidak dilakukan pengujian *White Heterokedasticity* dengan bantuan *software Eviews 8*. Jika hasil $p\text{-value}$ *Prob. Chi Square* $> 0,05$ maka H_0 diterima yang artinya varians error bersifat homoskedastisitas.

⁶⁵ Wing Wahyu Winarno, *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews* (Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2009), p.537

c. Deteksi Multikolinearitas

Multikolinearitas ada pada setiap persamaan regresi, disini yang akan diuji bukanlah ada atau tidaknya multikolinearitas, tetapi menentukan seberapa banyak atau parah multikolinearitas itu ada. Menghitung Variance Inflation Factor untuk koefisien bisa dengan menggunakan rumus⁶⁶:

$$VIF = \frac{1}{(1-R_2^2)}$$

Keterangan:

R_2^2 = koefisien determinasi pada auxiliary regression

Untuk melihat apakah terdapat multikolinearitas pada variabel adalah dengan menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah $VIF > 10$ ⁶⁷.

d. Deteksi Autokorelasi

Autokorelasi adalah adanya korelasi antara variabel itu sendiri, pada pengamatan yang berbeda waktu atau individu. Cara mendeteksi autokorelasi dengan metode Brusch-Godfrey atau LM (*Lagrange Multiplier*). Dengan Kriteria apabila nilai Prob. F hitung > alpha (5%) berarti tidak terjadi autokorelasi, namun sebaliknya apabila nilai Prob.

⁶⁶ Sarwoko, *Dasar-dasar Ekoometrika*, (Yogyakarta: ANDI, 2005), p.120

⁶⁷ Ghazali Imam, Dwi Ratmono, *Analisis Multivariat dan Ekonometrika*, (Semarang, Badan Penerbit Undip, 2013), p.84

$F_{hitung} < \alpha$ (5 %) berarti terdapat autokorelasi dan harus ditanggulangi⁶⁸.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Keberartian Regresi Secara Simultan (uji F)

Uji F (*F-Test*) dimaksudkan untuk mengetahui signifikansi statistik koefisien regresi secara serempak. Uji F digunakan untuk membuktikan berdasarkan statistik bahwa seluruh variabel independen berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} . Nilai F dapat dihitung menggunakan rumus⁶⁹:

$$F = \frac{R^2 / (k-1)}{(1 - R^2) / (n-k)}$$

Dimana:

R^2 : koefisien determinasi

K : jumlah variabel independen ditambah intersep dari suatu model persamaan

n : jumlah sampel

Hipotesis pengujian:

$H_0 : \beta_i \leq 0$

$H_1 : \beta_i \geq 0$

⁶⁸ Ansofino, dkk, *Buku Ajar Ekonometrika*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), p.64-66

⁶⁹ Damodar N. Gujarati. *op. cit.*, p. 195

Kriteria pengambilan keputusannya, yaitu:

- Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, artinya seluruh variabel bebas tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, maka H_0 diterima.
- Jika $F_{hitung} \geq F_{tabel}$, artinya seluruh variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, maka H_0 ditolak.

b. Uji Keberartian Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji t dimaksudkan untuk mengetahui signifikansi statistik koefisien secara parsial. Selain itu, uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai t dapat dihitung menggunakan rumus⁷⁰:

$$t = \frac{R \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-R^2}}$$

Keterangan:

R : koefisien korelasi variabel

R^2 : koefisien determinasi variabel

n : jumlah data

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui apakah pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sesuai hipotesis atau tidak.

⁷⁰ Damodar Gujarati, *Ekonometrika Dasar*, (Jakarta: Erlangga, 1978), p. 188

1) Hipotesis statistik untuk variabel upah:

$$H_0 : \beta_1 \leq 0$$

$$H_1 : \beta_1 \geq 0$$

Kriteria pengujian:

- Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, H_0 ditolak, maka upah berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.
- Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, H_0 diterima, maka upah tidak signifikan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

2) Hipotesis statistik untuk variabel investasi:

$$H_0 : \beta_1 \leq 0$$

$$H_1 : \beta_1 \geq 0$$

Kriteria pengujian:

- Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, H_0 ditolak, maka investasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.
- Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, H_0 diterima, maka investasi tidak signifikan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

3) Hipotesis statistik untuk variabel pengeluaran pemerintah:

$$H_0 : \beta_1 \leq 0$$

$$H_1 : \beta_1 \geq 0$$

Kriteria pengujian:

- Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, H_0 ditolak, maka pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

- Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, H_0 diterima, maka pengeluaran pemerintah tidak signifikan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

5. Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel upah, investasi dan pengeluaran pemerintah. Semakin besar nilai koefisien determinasi maka semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, semakin kecil nilai koefisien determinasi maka semakin kecil kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen atau sangat terbatas. Adapun rumus untuk menghitung koefisien determinasi (R^2) sebagai berikut⁷¹:

$$R^2 = \frac{\beta_1 \sum X_1 Y + \beta_2 \sum X_2 Y + \beta_3 \sum X_3 Y}{\sum Y^2}$$

Nilai R^2 menunjukkan seberapa besar variasi dari variabel terikat dapat dapat diterangkan oleh variabel bebas. Jika nilai R^2 terletak diantara 0 sampai dengan 1, nilai $0 \leq R^2 \leq 1$. Jika $R^2 = 0$, berarti variabel bebas tidak bias menjelaskan variasi perubahan variabel terikat, maka model dapat dikatakan buruk. Jika $R^2 = 1$, berarti variabel bebas mampu menjelaskan variasi perubahan variabel terikat dengan sempurna.

⁷¹ Damodar Gujarati, *op. cit.*, p. 98-99

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Deskripsi data variabel yang akan dipaparkan dalam penelitian ini meliputi data variabel upah sebagai variabel bebas (*independent*) X1, investasi sebagai variabel bebas (*independent*) X2, dan pengeluaran pemerintah sebagai variabel bebas (*independent*) X3 . Data penyerapan tenaga kerja pertanian sebagai variabel terikat (*dependent*) Y.

Tabel 4. 1
Statistik Deskriptif

	LAB	WG	INV	GOV
Mean	14,04816	9,867090	11,99485	11,76811
Median	14,40569	9,842718	12,25011	11,77686
Maximum	15,79358	10,60429	14,73077	13,33600
Minimum	10,69935	9,459245	5,799093	9,545603
Std. Dev.	1,395880	0,258372	1,862088	0,949744
Skewness	-1,051494	0,939425	-1,169202	-0,366062
Kurtosis	3,569113	3,931057	4,698629	2,703949

Data Olahan Eviews 8.0

1. Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terserap pada suatu unit usaha dalam waktu tertentu. Tenaga kerja sektor pertanian sangat penting mengingat bahwa sektor pertanian merupakan sektor utama penyumbang perekonomian.

Data penyerapan tenaga kerja dalam penelitian ini menggunakan data penyerapan tenaga kerja yang bekerja pada sektor pertanian yang berasal dari Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Pertanian (Pusdatin Kementan) di 10 provinsi di Indonesia tahun 2012-2015.

Berdasarkan data yang terdapat pada lampiran 1, penyerapan tenaga kerja sektor pertanian terbesar dari tahun 2012-2015 terdapat pada provinsi Jawa Timur tahun 2012 sebesar 7.228.786 orang dan jumlah terendah pada provinsi Kepulauan Riau tahun 2014 sebesar 44.327 orang.

Tabel 4. 2
Data Penyerapan Tenaga Kerja Tertinggi dan Terendah
(orang per tahun)

Tahun	Provinsi Tertinggi			Provinsi Terendah		
2012	Jatim 7.228.786	Jateng 4.837.914	Jabar 3.594.392	Banten 611.575	Bengkulu 466.713	Jabar 52.712
2013	Jatim 6.990.025	Jateng 4.571.767	Jabar 3.473.209	Banten 645.195	Bengkulu 462.504	Kepri 47.664
2014	Jatim 6.957.609	Jateng 4.848.117	Jabar 3.635.628	Banten 579.691	Bengkulu 479.123	Kepri 44.327
2015	Jatim 6.858.661	Jateng 4.789.935	Jabar 3.413.358	Banten 593.144	Bengkulu 455.250	Kepri 47.897

Sumber: Pusdatin Kementan, diolah peneliti

Berdasarkan data pada tabel di atas, jumlah penyerapan tenaga kerja sektor pertanian tertinggi pada tahun 2012 yaitu provinsi Jawa Timur dan terendah yaitu provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2013 yaitu provinsi Jawa Timur dan terendah yaitu provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2014 yaitu provinsi Jawa Timur dan terendah yaitu provinsi Kepulauan Riau. Kemudian pada tahun 2015 yaitu provinsi Jawa Timur dan terendah yaitu provinsi Kepulauan Riau sebesar.

2. Tingkat Upah

Upah adalah balas jasa yang diberikan oleh pemberi kerja kepada penerima kerja atas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh penerima kerja yang jumlahnya telah ditetapkan dalam sebuah perjanjian kerja. Data dalam penelitian ini menggunakan data upah tenaga kerja sektor pertanian di 10 provinsi di Indonesia yang di dapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2012-2015.

Berdasarkan data yang terdapat pada lampiran 2, menunjukkan bahwa upah sektor pertanian terbesar terdapat pada provinsi Kepulauan Riau tahun 2015 sebesar Rp. 40.307.000.000 dan terendah pada provinsi Jawa Tengah tahun 2012 sebesar Rp. 12.826.000.000.

Tabel 4. 3
Data Upah Tertinggi dan Terendah (dalam juta rupiah per tahun)

Tahun	Provinsi Tertinggi			Provinsi Terendah		
2012	Kepri 27.074	Banten 20.113	Bengkulu 18.014	Lampung 13.344	Jatim 13.054	Jateng 12.826
2013	Kepri 33.007	Banten 23.285	Bengkulu 19.337	Lampung 15.095	Jatim 14.630	Jateng 13.828
2014	Kepri 35.827	Banten 26.298	Bengkulu 20.577	Lampung 16.564	Jatim 15.710	Jateng 15.010
2015	Kepri 40.307	Banten 27.572	Bengkulu 21.262	Lampung 18.015	Jatim 17.449	Jateng 16.438

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah peneliti

Berdasarkan data upah tenaga kerja sektor pertanian pada tabel di atas, menunjukkan bahwa upah tenaga kerja sektor pertanian fluktuatif namun cenderung meningkat. Hal ini disebabkan upah minimum yang terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data pada tabel di atas, upah tenaga kerja sektor pertanian tertinggi pada tahun 2012 hingga tahun 2015 yaitu provinsi Kepulauan Riau dan terendah yaitu provinsi Jawa Tengah.

3. Investasi

Data investasi dalam penelitian ini menggunakan data investasi yang terdiri dari total PMA dan PMDN sektor pertanian di 10 provinsi di Indonesia yang di dapatkan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Berdasarkan data yang terdapat pada lampiran 3, menunjukkan bahwa investasi pada sektor pertanian terbesar terdapat pada provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 sebesar Rp. 2.497.421.000.000 dan terendah terdapat pada provinsi Kepulauan Riau tahun 2013 sebesar Rp. 330.000.000.

Tabel 4. 4
Data Investasi Tertinggi dan Terendah (dalam juta rupiah per tahun)

Tahun	Provinsi Tertinggi				Provinsi Terendah		
2012	Sumsel 1.540.813	Jambi 1.286.598	Lampung 732.968		Banten 87.825	Jatim 25.399	Kepri 135.780
2013	Sumsel 1.572.811	Jateng 157.150	Sumut 1.003.693		Jabar 58.674	Banten 36.110	Kepri 330
2014	Sumsel 2.497.421	Sumut 619.566	Jambi 562.893		Lampung 37.356	Kepri 10.048	Banten 2.250
2015	Sumsel 1.356.369	Jambi 798.693	Jabar 681.028		Jatim 126.718	Jateng 47.548	Kepri 16.607

Sumber: BKPM, diolah peneliti

Berdasarkan data investasi sektor pertanian di Indonesia dari tahun 2012 hingga tahun 2015 yang terdapat pada tabel di atas, investasi di sektor pertanian tertinggi pada tahun 2012 hingga tahun 2013 yaitu provinsi Sumatera Selatan dan terendah yaitu provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2014 yaitu provinsi Sumatera Selatan dan terendah yaitu provinsi Banten. Kemudian pada tahun 2015 yaitu provinsi Sumatera Selatan dan terendah yaitu provinsi Kepulauan Riau.

4. Pengeluaran Pemerintah

Data pengeluaran pemerintah dalam penelitian ini menggunakan data belanja pemerintah untuk sektor pertanian di 10 provinsi di Indonesia yang diperoleh dari Kementerian Keuangan RI tahun 2012 hingga tahun 2015.

Berdasarkan data yang terdapat pada lampiran 4, menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor pertanian terbesar terdapat pada provinsi Jawa Timur tahun 2015 sebesar Rp. 663.005.000.000 dan terendah terdapat pada provinsi Kepulauan Riau tahun 2012 sebesar Rp. 20.401.000.000.

Tabel 4. 5
Data Pengeluaran Pemerintah Tertinggi dan Terendah
(dalam juta rupiah per tahun)

Tahun	Provinsi Tertinggi			Provinsi Terendah		
2012	Jatim 561.911	Jabar 300.569	Jateng 269.249	Lampung 65.081	Banten 41.628	Kepri 20.401
2013	Jatim 578.044	Jabar 349.087	Jateng 330.147	Lampung 99.059	Banten 59.140	Kepri 25.273
2014	Jatim 619.087	Jateng 364.642	Jabar 347.554	Lampung 97.393	Banten 84.973	Kepri 33.983
2015	Jatim 663.005	Jabar 391.063	Jabar 389.665	Lampung 115.465	Bengkulu 111.229	Kepri 26.481

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah peneliti

Berdasarkan tabel di atas, pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian tertinggi pada tahun 2012 hingga tahun 2015 yaitu provinsi Jawa Timur dan terendah yaitu provinsi Kepulauan Riau. Pengeluaran pemerintah tertinggi pada provinsi Jawa Timur sebagian besar digunakan untuk belanja modal pertanian, berupa subsidi pupuk dan subsidi benih maupun bibit tanaman.

Berdasarkan porsinya terhadap APBD dari tahun 2012 hingga tahun 2015, alokasi pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian tertinggi pada provinsi

Jawa Timur pada tahun 2015 sebesar 12,2 persen, sedangkan alokasi pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian terendah terdapat pada provinsi banten tahun 2012 yaitu sebesar 0,71 persen untuk sektor pertanian.

B. Uji Spesifikasi Model

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dan diolah menggunakan program Eviews 8.0. Kelebihan dari program ini adalah kemampuannya dalam mengolah data panel menjadi lebih mudah, karena dapat diperlakukan sebagai data cross section, time series, maupun sebagai data panel.

Berdasarkan uji Chow dan uji Hausman yang telah peneliti lakukan maka peneliti memutuskan untuk menggunakan persamaan regresi data panel dengan model fixed effect dalam penelitian ini.

1. Pemilihan Model Terbaik

Pemilihan model terbaik ini digunakan untuk mengetahui apakah common effect, fixed effect atau random effect yang paling baik digunakan dalam menganalisis variabel-variabel yang diteliti.

a. Uji Chow

Signifikansi model Common Effects atau Fixed Effects dapat dilakukan dengan Uji Chow.

Hipotesis:

Ho : Model common effect

Hi : Model fixed effect

Dalam hal ini menggunakan alpha sebesar 5% (0,05) dengan ketentuan menolak H_0 jika nilai $p - \text{value} < \alpha$. Dari hasil pengujian dengan Eviews 8.0 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 6

Uji Chow

<i>Chow Test</i>	
<i>Prob. Chi Square</i>	0,0000
Model Terpilih	<i>Fixed Effect</i>

Data diolah Peneliti

Berdasarkan hasil pengujian dengan Eviews 8.0 yang terdapat pada Lampiran 7, $p - \text{value}$ cross section/period Chi-Square $0,0000 < 0,05$ atau nilai probability ($p - \text{value}$) F Test $0,0000 < 0,05$, maka H_0 ditolak yang artinya menggunakan model fixed effect.

b. Uji Hausman

Signifikansi model Fixed Effects atau Random Effects dilakukan dengan Uji Hausman.

Hipotesis:

H_0 : Model random effect

H_1 : Model fixed effect

Dalam hal ini pengujian ini menggunakan alpha sebesar 5% (0,05). Dengan ketentuan menerima H_0 jika nilai $p - \text{value}$ period random $> \alpha$. Dari hasil pengujian dengan Eviews 8.0 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 7

Uji Hausman

<i>Hausman Test</i>	
<i>Prob. Chi Square</i>	0,0000
Model Terpilih	<i>Fixed Effect</i>

Data Diolah Peneliti

Berdasarkan hasil perhitungan di dapat dengan menggunakan software Eviews 8.0 yang terdapat pada Lampiran 9, $p - \text{value period random} < \alpha$ (0,05), sehingga dapat diambil keputusan untuk menolak H_0 , dengan kesimpulan model fixed effect lebih baik jika dibandingkan dengan model random effect.

2. Deteksi Asumsi Klasik

Deteksi asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi deteksi normalitas, deteksi heteroskedastisitas, deteksi multikolinearitas, dan deteksi autokorelasi.

a. Deteksi Normalitas

Berdasarkan hasil output Eviews.8.0 yang terdapat pada lampiran 10, menunjukkan $p\text{-value Jarque-Bera}$ adalah $0,711337 > 0,05$. Dengan demikian, H_0 diterima yang artinya error mengikuti fungsi distribusi normal.

b. Deteksi Heteroskedastisitas

Deteksi heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Regresi yang baik adalah yang Homokedastisitas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada pengujian data dilakukan Uji White dengan hipotesis sebagai berikut:

- H_0 : Varians error bersifat homoskedastisitas
- H_1 : Varians error bersifat heteroskedastisitas

Tabel 4. 8
Deteksi Heteroskedastisitas

Obs*R-squared	13,79241
<i>Prob. Chi-Square</i>	0,1299

Data diolah Peneliti

Berdasarkan metode White yang dilakukan dengan menggunakan *software Eviews 8.0* pada tabel 4. 8 di atas menunjukkan bahwa p-value Prob. Chi-Squared adalah $0,1299 > 0,05$ maka H_0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh heteroskedastisitas.

c. Deteksi Multikolinearitas

Berdasarkan data yang diolah dengan menggunakan program *eviews*, didapatkan hasil deteksi multikolinearitas seperti yang terlihat pada tabel 4. 9 dibawah ini.

Tabel 4. 9
Deteksi Multikolinearitas

Variabel	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
Upah	0,117722	3114,838	2,080948
Investasi	0,001451	58,03705	1,332400
Pengeluaran Pemerintah	0,008084	306,0020	1,930988

Data diolah Peneliti

Berdasarkan tabel 4.9 di atas nilai VIF tidak ada yang di atas 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi ini.

d. Deteksi Autokorelasi

Berdasarkan data yang diolah dengan menggunakan program eviews menggunakan metode Breusch-Godfrey, didapatkan hasil deteksi autokorelasi seperti yang terlihat pada tabel 4. 10 dibawah ini.

Tabel 4. 10
Deteksi Autokorelasi

F-statistic	1,728514
Obs*R-squared	3,691727
<i>Prob. F</i>	0,1928
<i>Prob. Chi-Square</i>	0,1579

Data diolah Peneliti

Berdasarkan tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa nilai Prob. F sebesar $0,1928 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

3. Persamaan Regresi

Pengujian ini menggunakan persamaan regresi linier berganda, yaitu untuk mengetahui pengaruh secara kuantitatif dari Upah (X1), Investasi (X2) dan Pengeluaran Pemerintah (X3) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (Y). Analisis digunakan karena jumlah variabel bebas yang diteliti lebih dari satu untuk menganalisis pengaruh antara variabel terikat dengan variabel bebasnya. Berdasarkan pengolahan data yang sudah dilakukan, diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut:

Tabel 4. 11
Persamaan Regresi

Variabel	C	Upah	Investasi	Pengeluaran Pemerintah
<i>Coefficient</i>	15,62318	-0,248916	0,003199	0,071609
<i>Probability</i>	0,0000	0,0003	0,5363	0,0099

Data diolah Peneliti

Dari tabel di atas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\mathbf{LnLAB = 15,623 - 0,248 LnWG + 0,003 LnINV + 0,071 LnGOV}$$

Selanjutnya, setelah dilakukan pengujian ketepatan model regresi data panel dengan uji F, yang kemudian dilanjutkan dengan pengujian signifikansi pengaruh tiap variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan uji t beserta interpretasi variabel mempengaruhi variabel dependen. Setelah itu dilakukan analisis Koefisien Determinasi.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Keberartian Regresi Secara Simultan (uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan secara simultan antara variabel-variabel bebas dengan variabel terikat. Ketentuan penerimaan hipotesis secara simultan yaitu dengan melihat nilai probabilitas signifikansi. Selain itu dapat juga menggunakan perhitungan dengan membandingkan F_{hitung} dan F_{tabel} dengan tingkat keyakinan 95% atau $\alpha = 5\%$. df_1 (jumlah variabel-1) dan df_2 ($n-k-1$) dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel bebas. Dari tabel nilai kritis distribusi F dengan tingkat

keyakinan 95% atau $\alpha=5\%$, dan nilai $df_1 = 3$ dan $df_2 = 35$ diperoleh F_{tabel} sebesar 2,87. Hasil uji F dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 12

Hasil Uji F

F Hitung	6209,349
F Tabel	2,87
<i>Prob. F Statistic</i>	0,000000

Data diolah Peneliti

Berdasarkan tabel 4.12 terlihat bahwa F_{hitung} yang lebih besar daripada F_{tabel} ($6209,349 > 2,87$) serta nilai dari probabilitas (F-statistik) sebesar 0,000000 dimana nilai probabilitas ini berada dibawah nilai signifikansi sebesar 5% ($0,000000 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil uji F (simultan) menolak H_0 , artinya bahwa variabel Upah, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah memiliki pengaruh secara simultan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.

b. Uji Keberartian Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan antara t_{hitung} dan t_{tabel} yang ditentukan dengan tingkat signifikansi 5%.

Tabel 4. 13

Hasil Uji t

Variabel	Upah	Investasi	Pengeluaran Pemerintah
<i>Coefficient</i>	-0,248916	0,003199	0,071609
t hitung	-4,163801	0,626395	2,775540
t tabel	2,03011		
<i>Probability</i>	0,0003	0,5363	0,0099

Data diolah Peneliti

Berdasarkan tabel 4.13, berikut ini disajikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil perhitungan *Eviews 8.0*, nilai t_{hitung} upah adalah sebesar 4,163801 dibandingkan dengan t_{tabel} pada tabel distribusi t dengan $\alpha = 5\%$ dengan derajat kebebasan (df) = $n-k-1$ atau $40-4-1 = 35$, hasilnya diperoleh t_{tabel} sebesar 2,03011. Dari hasil perbandingan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} terlihat bahwa t_{hitung} (4,163801) > t_{tabel} (2,03011) yang berarti bahwa upah memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Selain itu jika dilihat dari nilai probabilitas signifikannya, maka nilai signifikan dari upah (0,0003) < (0,05). Sehingga ditarik kesimpulan, yaitu secara parsial upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.
2. Dari hasil perbandingan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} variabel investasi terlihat bahwa t_{hitung} (0,626395) < t_{tabel} (2,03011) yang berarti bahwa investasi memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Selain itu jika dilihat dari nilai probabilitas signifikannya, maka nilai signifikan dari investasi (0,5363) > (0,05). Sehingga ditarik kesimpulan, yaitu secara parsial investasi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.
3. Dari hasil perbandingan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} variabel pengeluaran pemerintah terlihat bahwa t_{hitung} (2,775540) > t_{tabel} (2,03011) yang berarti bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Selain itu jika dilihat dari nilai probabilitas signifikannya, maka nilai signifikan dari pengeluaran pemerintah

$(0,0099) < (0,05)$. Sehingga ditarik kesimpulan, yaitu secara parsial pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

4. Analisis Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil analisis koefisien korelasi berdasarkan output *Eviews.8.0* diperoleh nilai R^2 sebesar 0,99. Dengan semakin besar nilai koefisien determinasi maka semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Salah satu sifat penting dari R^2 adalah semakin banyak jumlah variabel bebas dalam suatu mode, maka akan semakin tinggi nilai R^2 ⁷². Perlu diketahui pada model *fixed effect*, terdapat *individual effect* yang berkorelasi dengan variabel bebas untuk mengakomodir heterogenitas yang terjadi antar individu ataupun *cross section* nya. Setiap efek individu tersebut merupakan parameter yang tidak diketahui dan akan diestimasi dengan menggunakan teknik variabel *dummy* (*LSDV*). Implikasi dari pengestimasian efek individu tersebut yang menyebabkan R^2 jadi membesar. Adjusted R^2 yang dihasilkan pada *model fixed effect* dapat dikatakan semu dikarenakan variasi dari variabel *dependen* pada model juga dijelaskan oleh efek individu (variabel *dummy* pada model *fixed effect*) yang kemungkinan besar menangkap variabel-variabel lain di luar model penelitian. Konsekuensi dari pemilihan model *fixed* adalah kita memasukkan banyak *dummy* yang akan mengurangi *degree of freedom* (df)⁷³. Sehingga inilah yang menyebabkan R^2 pada model *fixed effect*

⁷² Damodar N. Gujarati, *Dasar-Dasar Ekonometrika*, (Jakarta, Erlangga, 2003), p. 196.

⁷³ Damodar N. Gujarati, *Op. Cit.*, p. 284.

pada data panel akan cenderung tinggi hampir mendekati 1 (satu) dan dianggap semu.

5. Spesifikasi Fixed Effect

Berdasarkan lampiran 6 dapat diketahui spesifikasi efek individual penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian tiap provinsi. Berikut hasil spesifikasi fixed effect:

Tabel 4. 14
Spesifikasi Fixed Effect

_SUMUT—C	16,283
_JAMBI—C	15,126
_SUMSEL—C	16,03
_BENGKULU—C	14,664
_LAMPUNG—C	15,907
_KEPRI—C	12,64
_JABAR—C	16,587
_JATENG—C	16,819
_JATIM—C	17,17
_BANTEN—C	15,004

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi spesifikasi efek individual masing-masing provinsi. Provinsi dengan penyerapan tenaga kerja tertinggi berdasarkan hasil spesifikasi efek individual yaitu pada provinsi Jawa Timur sebesar 17,17, artinya apabila angka koefisien variabel bebas rendah atau mendekati nol maka penyerapan tenaga kerja tertinggi yaitu pada provinsi Jawa Timur. Sedangkan Provinsi dengan penyerapan tenaga kerja terendah berdasarkan hasil spesifikasi efek individual yaitu pada provinsi Kepulauan Riau sebesar 12,64 artinya apabila angka koefisien variabel bebas

rendah atau mendekati nol maka penyerapan tenaga kerja terendah yaitu pada provinsi Kepulauan Riau.

C. Pembahasan

Beberapa pengujian telah dilakukan sebelumnya ternyata menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan terbebas dari penyakit asumsi klasik. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan baik secara parsial ataupun secara bersama-sama dengan menggunakan data dari tahun 2012 sampai tahun 2015 sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Berdasarkan hasil analisis regresi dapat dilihat persamaan sebagai berikut:

$$\text{LnLAB} = 15,623 - 0,248 \text{ LnWG} + 0,003 \text{ LnINV} + 0,071 \text{ LnGOV}$$

Berikut adalah pembahasan dari masing-masing variabel:

1. Pengaruh Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil persamaan regresi dapat diketahui bahwa upah memiliki angka koefisien sebesar -0,248, angka koefisien upah tersebut merupakan angka koefisien yang paling dominan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian diantara variabel lain. Hal ini disebabkan upah merupakan motivasi bagi pekerja untuk lebih semangat bekerja. Jika dilihat dari angka koefisiennya adalah negatif. Jika dilihat dari sisi pemberi kerja, upah yang cenderung meningkat setiap tahunnya akan menyebabkan jumlah penyerapan tenaga kerja karena pemberi kerja mengurangi jumlah pekerja untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Hasil persamaan regresi memiliki konstanta sebesar 15,623 yang menunjukkan bahwa ketika upah adalah konstan, maka nilai penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian sebesar 15,623 persen. Berdasarkan hasil perbandingan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} pada tingkat upah (WG), terlihat bahwa $t_{hitung} (-4,163801) > t_{tabel} (-2,03011)$ dengan koefisien negatif menunjukkan pengaruh negatif antara tingkat upah dengan penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian dan sesuai dengan hipotesis. Angka koefisien upah yaitu sebesar -0,248 yang menunjukkan apabila upah naik sebesar 1% dengan asumsi *ceteris paribus*, maka penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian akan menurun sebesar 24,8%. Hal ini menunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan upah minimum akan berpengaruh terhadap penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Hasil tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Dimas dan Nenik Woyanti yang menyimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat upah maka penyerapan tenaga kerja akan menurun⁷⁴.

2. Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Hasil persamaan regresi memiliki konstanta sebesar 15,623 yang menunjukkan bahwa ketika investasi adalah konstan, maka nilai penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian sebesar 15,623 persen. Berdasarkan hasil perbandingan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} pada tingkat investasi (INV), terlihat bahwa $t_{hitung} (0,626395) < t_{tabel} (2,03011)$ dengan koefisien positif dan sesuai dengan hipotesis. Namun investasi tidak signifikan mempengaruhi

⁷⁴ Dimas dan Nenik Woyanti, *Op Cit*, p. 32-41

penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, karena investasi tersebut cenderung padat modal sehingga kurang menyerap tenaga kerja. Pada sektor pertanian, umumnya para investor melakukan investasi yang berorientasi pada pasar ekspor dan cenderung untuk subsektor perkebunan yang memiliki pasar ekspor lebih besar sehingga perannya sangat kecil dalam penyerapan tenaga kerja. Seperti yang diketahui bahwa lahan perkebunan besar hanya terdapat di beberapa provinsi di Indonesia saja, sehingga peran investasi ini tidak signifikan dalam kontribusinya dalam menyerap tenaga kerja.

Hasil tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Rudi Sofia Dkk yang menunjukkan hasil bahwa investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Kontribusi investasi terhadap penyerapan tenaga kerja tidak mengalami peningkatan yang berarti, malah cenderung menurunkan penyerapan tenaga kerja⁷⁵.

3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Hasil persamaan regresi memiliki konstanta sebesar 15,623 yang menunjukkan bahwa ketika pengeluaran pemerintah adalah konstan, maka nilai penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian sebesar 15,623 persen. Berdasarkan hasil persamaan regresi dapat diketahui bahwa pengeluaran pemerintah memiliki angka koefisien sebesar 0,071. Anggaran yang dikeluarkan pemerintah provinsi terbatas terutama untuk sektor pertanian.

⁷⁵ Rudi Sofia Sandika, Rudi Sofia Sandika, Yusni Maulida, dan Deny Setiawan, *op. cit.*, p.1-16

Berdasarkan proporsinya, untuk urusan pertanian cenderung kecil. Hal ini dikarenakan pemerintah masih fokus untuk urusan lain seperti urusan pendidikan maupun kesehatan.

Berdasarkan hasil perbandingan antara t hitung dengan t tabel pada pengeluaran pemerintah (GOV), terlihat bahwa $t_{hitung} (2,775540) > t_{tabel} (2,03011)$ dengan koefisien positif menunjukkan pengaruh positif antara pengeluaran pemerintah dengan penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian dan sesuai dengan hipotesis. Angka koefisien pengeluaran pemerintah yaitu sebesar 0,071 yang menunjukkan apabila pengeluaran pemerintah naik sebesar 1% dengan asumsi *ceteris paribus*, maka penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian akan meningkat sebesar 7,1 %. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pemerintah meningkatkan besaran pengeluaran pemerintah akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

Hasil tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Elysabeth Danauli dan Freddy Wangke yang menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah secara signifikan positif mempengaruhi penyerapan tenaga kerja⁷⁶. Peneliti dari Matius Irsan Kasau, *et. al*, juga menunjukkan hasil bahwa semakin tinggi pengeluaran pemerintah maka penyerapan tenaga kerja akan meningkat⁷⁷.

⁷⁶ Elysabeth Danauli dan Freddy Wangke, *op. cit.* p. 11-21

⁷⁷ Matius Irsan Kasau, *et. al.*, *op. cit.*, p. 55-64

D. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak sepenuhnya sampai pada kebenaran mutlak. Hal ini disebabkan adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian, yaitu peneliti melakukan penelitian dalam jangka waktu yang cukup pendek yaitu jangka waktu empat tahun dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dan provinsi yang diteliti hanya 10 provinsi di Indonesia. Penelitian hanya dilakukan dalam jangka waktu dan provinsi tersebut karena adanya keterbatasan waktu, biaya, dan data.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 menunjukkan bahwa terdapat “Pengaruh Antara Upah, Investasi, dan Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pertanian di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan analisis data panel yang terdiri dari 10 provinsi di Indonesia, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upah memiliki pengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja sektor pertanian di Indonesia tahun 2012 hingga tahun 2015.
2. Investasi memiliki pengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja sektor pertanian di Indonesia tahun 2012 hingga tahun 2015.
3. Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja sektor pertanian di Indonesia tahun 2012 hingga tahun 2015.
4. Upah, Investasi, dan Pengeluaran Pemerintah secara bersama-sama mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja sektor pertanian di Indonesia.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, implikasi yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian adalah:

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, upah mempunyai dampak terhadap pengambilan keputusan pemberi kerja dalam penyerapan tenaga kerja di pertanian. Kenaikan upah yang terjadi akan membuat para pemberi kerja untuk mengurangi jumlah pekerja yang dipekerjakan di lahan pertanian mereka. Karena apabila terdapat banyak tenaga kerja yang dipekerjakan maka keuntungan yang di dapatkan pemberi kerja akan sedikit karena keuntungan tersebut sebagian digunakan untuk biaya produksi dan membayar sejumlah tenaga kerja.
2. Investasi memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pertanian di Indonesia. Artinya investasi memang akan menambah jumlah modal pada sektor pertanian tetapi hal tersebut tidak berdampak pada penyerapan tenaga kerja, dikarenakan investor cenderung menginvestasikan modalnya pada subsektor perkebunan yang memiliki pangsa ekspor yang besar saja sehingga perannya dalam penyerapan tenaga kerja sektor pertanian sangat kecil.
3. Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja pertanian di Indonesia. Artinya apabila pemerintah meningkatkan anggaran melalui belanja langsung, maka akan menambah jumlah tenaga kerja yang di serap pada sektor pertanian.

C. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian dan memperoleh hasilnya, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Pemberi kerja hendaknya lebih berani mengambil resiko dari dampak kenaikan upah minimum dan memenuhi hak pekerja
2. Pemerintah provinsi sebaiknya melakukan dan mengarahkan investasi yang tidak hanya berorientasi pada subsektor perkebunan saja, melainkan pada subsektor lain seperti tanaman pangan, hortikultura maupun peternakan.
3. Pemerintah provinsi dapat meningkatkan perhatiannya untuk sektor pertanian dengan meningkatkan anggaran yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian. Peningkatan anggaran pemerintah ini dapat digunakan untuk menciptakan program padat karya misalnya pembangunan saluran irigasi di lahan pertanian untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Widarjono. *Ekonometrika*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2013
- Ansofino, dkk. *Buku Ajar Ekonometrika*. Yogyakarta: Deepublish. 2016
- Arsyad, Lincolin. *Ekonomi Pembangunan Ed. Kelima*. Yogyakarta: STIM YKPN. 2010
- Badan Koordinasi Penanaman Modal. *Investasi PMA dan PMDN Sektor Pertanian*. Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal. 2016
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Upah 2016*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. 2016
- _____. *Keadaan Pekerja 2008-2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. 2015
- Badi, H. Baltagi. *Econometric Analysis of Panel Data*. England: John Wiley & Sons, Ltd. 2005
- Djalal, Nachrowi, dkk. *Penggunaan Teknik Ekonometri Edisi Revisi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2002
- Dornbusch, Rudiger, Fisher, dan Startz. *Makroekonomi*. Mc Graw Hill. 2015
- Dumairy. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga. 1997
- Ghozali Imam, Dwi Ratmono. *Analisis Multivariat dan Ekonometrika*. Semarang: Badan Penerbit Undip. 2013
- Gujarati, Damodar N. *Dasar-dasar Ekonometrika Jilid I*. Jakarta: Erlangga. 2006
- _____. *Dasar-dasar Ekonometrika Jilid II*. Jakarta: Erlangga. 2006
- _____. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga. 1978
- Karya, Detri. *Makroekonomi Pengantar untuk Manajemen Edisi Pertama*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada. 2016
- Kementerian Keuangan. *Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian 2008-2016*. Jakarta: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. 2016
- Kementerian Pertanian. *Statistik Ketenagakerjaan 2008-2016*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian. 2016
- Laily, Nur dan Ec. Budiyono Pristyadi. *Teori Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013

- Machmud, Amir. *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Erlangga. 2016
- Mankiw, N. Gregory. *Teori Makroekonomi Edisi Kelima*. Jakarta: Erlangga. 2003
- Mulyadi S. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2006
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani*
- Republik Indonesia. *PERMENDAGRI No. 13 tahun 2006*
- Priyatno, Duwi. *Buku Saku SPSS Analisis Statistik Data*. Jakarta: MediaKom. 2011
- Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung. *Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2004
- Sarwoko. *Dasar-dasar Ekoometrika*. Yogyakarta: ANDI. 2005
- Simanjuntak, Payaman J. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: FE UI Fakultas Ekonomi UI. 1998
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Alfabeta. 2004
- Sukirno, Sadono. *Pengantar Teori Makroekonomi Edisi Ketiga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012
- Sumarsono, Sonny. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaa*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2003
- Todaro, Michael. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Jilid I Ed. Ketujuh*. Jakarta: Erlangga. 2000
- Wing Wahyu Winarno. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2009

Sumber Jurnal:

- Arida, Agustina, Zakiah dan Julaini. “Analisis Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja Pada Sektor Pertanian di Provinsi Aceh”, *Agrisep* Vol. 16 No. 1 2015. p. 66-78
- Dinauli, Elysabeth dan Freddy Wangke. “Pengaruh Upah Tenaga Kerja dan Investasi Pemerintah terhadap penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia than 1996-2008”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Indonesia Atmajaya 1 Februari 2013*, p. 11-21
- Divianto. “Pengaruh Upah, Modal, Produktivitas, Dan Teknologi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Usaha Kecil-Menengah di Kota Palembang (Studi Kasus Usaha Percetakan)”, *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi*, Vol. 4 No. 1, Januari 2014, p. 48-58
- Manuaba, I B Km. Adi Sutrisna, dan I Nengah Kartika. “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja Melalui Pendidikan”, *E-Jurnal Ep Unud*, Vol. 5 No.9, September 2016 ISSN: 2303-0178, p. 960-992
- Matius Irsan Kasau, *et. al.*, “Effect Of Government Spending On Employment Through Investment And Its Impact On The Eastern And Western Indonesia”. *International Journal Of Research In Social Sciences*, July 2015. Vol. 5 No.5 ISSN 2307-227x. p. 55-64
- Purnomo, Didit. “Fenomena Migrasi Tenaga Kerja Dan Perannya Bagi Pembangunan Daerah Asal: Studi Empiris Di Kabupaten Wonogiri”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 10, No.1, Juni 2009, p. 84 – 102
- Rahayu, Sri Endang. “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara”. *Jurnal Manajemen & Bisnis*, Vol 11 No. 02, Oktober 2011 ISSN 1693-7619, p. 126-138
- Safina, Lailan dan Sri Endang Rahayu. “Analisis Pengaruh Investasi Pemerintah dan Swasta Terhadap Penciptaan Kesempatan Kerja di Sumatera Utara”, *Jurnal Manajemen & Bisnis*, Vol 11 No. 01, April 2011, p. 1-11
- Sitanggang, Ignatia R. *et al.* “Pengaruh Struktural Ekonomi Pada Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral: Analisis Model Demometrik di 30 Provinsi Pada 9

- Sektor di Indonesia”. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*. Vol. 5 No. 1, p. 103-1033
- Sofia Sandika, Rudi, Yusni Maulida, dan Deny Setiawan. “Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Pelalawan”, *JOM FEKON* 1. No. 2 Oktober 2014, p. 1-16
- SP Hutagalung, Paul dan Purbayu Budi Santosa. “Analisis Pengaruh Upah Minimum Dan Inflasi Terhadap Kesempatan Kerja Sektor Industri Pengolahan Besar dan Sedang di Jawa Tengah”, *Jurusan IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP*, Vol. 2, No. 4, Tahun 2013 ISSN : 2337-3814, p. 1-12
- Subijanto, “Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* vol. 17 no. 6, 2011, p. 705-718
- Tandiawan, Elvandry, Amran Naukoko dan Patrick Wauran. “Pengaruh Investasi Swasta dan Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kesempatan Kerja di Kota Manado Tahun 2001-2012”, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Vol. 15 No. 01 tahun 2015, p. 181-196
- Zamrowi, M. Taufik. Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil 2007. (http://eprints.undip.ac.id/15705/1/M_Taufik_Zamrowi.pdf)
- Zulhanafi, Hasdi Aimon, dan Efrizal Syofyan. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas dan Tingkat Pengangguran di Indonesia”, *Jurnal Kajian Ekonomi*, Vol. II, No.03, Juli 2013, p. 85-109

Sumber Web:

- Afriza Hanifa. *Kritis, Jumlah Lahan Pertanian di Indonesia*. <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/12/05/26/m4mavr-kritis-jumlah-lahan-pertanian-di-Indonesia> (diakses pada Rabu, 11 Januari 14.50 WIB)
- Debbie Sutrisno. *Lahan Pangan Indonesia Masih Sempit*. <http://www.republika.co.id/berita/koran/ekonomi->

koran/16/11/29/ohe3cc19-lahan-pangan-Indonesia-masih-sempit (diakses pada Rabu, 11 Januari 15.00 WIB)

Imam Prihadiyoko, Investasi Pertanian Tak Pernah Diurus Serius, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/04/13/20045422/Investasi.Pertanian.Tak.Pernah.Diurus.Serius> (diakses pada Kamis, 20 Juli pukul 10.50 WIB)

Muhammad Iqbal. Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Pertanian Turun. <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/13/05/06/mmderw-jumlah-tenaga-kerja-di-sektor-pertanian-turun> (diakses pada Rabu, 11 Januari 11.00 WIB)

Lampiran 1

Data Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian

(Orang)

Provinsi	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Sumatera Utara	2637930	2589638	2601757	2327828
Jambi	789870	750975	720107	786695
Sumatera Selatan	1983771	1879981	1949516	1904484
Bengkulu	466713	462504	479123	455250
Lampung	1709153	1716171	1731680	1721553
Kepulauan Riau	52712	47664	44327	47897
Jawa Barat	3594392	3473209	3635628	3413358
Jawa Tengah	4837914	4571767	4848117	4789935
Jawa Timur	7228786	6990025	6957609	6858661
Banten	611575	645195	579691	593144

Sumber: Pusdatin Kementerian Pertanian

Lampiran 2

Data Upah Minimum Sektor Pertanian

(Juta)

Provinsi	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Sumatera Utara	16813	18377	19283	20209
Jambi	16417	18829	20446	21262
Sumatera Selatan	17149	18813	19458	21137
Bengkulu	18014	19337	20577	21013
Lampung	13344	15095	16564	18015
Kepulauan Riau	27074	33007	35827	40307
Jawa Barat	16637	18226	19994	21675
Jawa Tengah	12826	13828	15010	16438
Jawa Timur	13054	14630	15710	17449
Banten	20113	23285	26298	27572

Sumber: Badan Pusat Statistik

Lampiran 3

Data Investasi Sektor Pertanian

(Juta)

Provinsi	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Sumatera Utara	653991	1003693	619566	221198
Jambi	1286598	317485	562893	798694
Sumatera Selatan	1540813	1572811	2497421	1356369
Bengkulu	189040	197482	150958	400639
Lampung	732968	95849	37356	349534
Kepulauan Riau	13580	330	10048	16607
Jawa Barat	234046	58674	324863	681028
Jawa Tengah	678661	157150	103128	47548
Jawa Timur	25399	61106	327601	126718
Banten	87825	36110	2250	153420

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal

Lampiran 4

Data Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian

(Juta)

Provinsi	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Sumatera Utara	178793	192783	210476	217751
Jambi	82853	129891	145124	122673
Sumatera Selatan	105631	174571	194256	178980
Bengkulu	65524	110570	99118	111229
Lampung	65081	99059	97393	115465
Kepulauan Riau	20401	25273	33983	26481
Jawa Barat	300569	349087	347554	391063
Jawa Tengah	269249	330147	364642	389665
Jawa Timur	561911	578044	619087	663005
Banten	41628	59140	84973	116819

Sumber: Kementerian Keuangan

Lampiran 5

Common Effect

Dependent Variable: LOG(LAB?)
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 06/21/17 Time: 15:34
 Sample: 2012 2015
 Included observations: 4
 Cross-sections included: 10
 Total pool (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	21.16829	4.237022	4.996031	0.0000
LOG(WG?)	-1.922098	0.343104	-5.602078	0.0000
LOG(INV?)	0.035506	0.038094	0.932070	0.3575
LOG(GOV?)	0.970376	0.089913	10.79236	0.0000
R-squared	0.930227	Mean dependent var		14.04816
Adjusted R-squared	0.924412	S.D. dependent var		1.395880
S.E. of regression	0.383772	Akaike info criterion		1.017104
Sum squared resid	5.302118	Schwarz criterion		1.185992
Log likelihood	-16.34208	Hannan-Quinn criter.		1.078169
F-statistic	159.9858	Durbin-Watson stat		0.634486
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 6

Fixed Effect

Dependent Variable: LOG(LAB?)
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 06/21/17 Time: 15:36
 Sample: 2012 2015
 Included observations: 4
 Cross-sections included: 10
 Total pool (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	15.62318	0.504022	30.99699	0.0000
LOG(WG?)	-0.248916	0.059781	-4.163801	0.0003
LOG(INV?)	0.003199	0.005106	0.626395	0.5363
LOG(GOV?)	0.071609	0.025800	2.775540	0.0099
Fixed Effects (Cross)				
_SUMUT--C	0.660729			
_JAMBI--C	-0.497805			
_SUMSEL--C	0.407479			
_BENGKULU--C	-0.959198			
_LAMPUNG--C	0.284730			
_KEPRI--C	-2.983744			
_JABAR--C	0.964309			
_JATENG--C	1.196013			
_JATIM--C	1.547180			
_BANTEN--C	-0.619694			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.999638	Mean dependent var	14.04816
Adjusted R-squared	0.999477	S.D. dependent var	1.395880
S.E. of regression	0.031929	Akaike info criterion	-3.793634
Sum squared resid	0.027526	Schwarz criterion	-3.244748
Log likelihood	88.87268	Hannan-Quinn criter.	-3.595174
F-statistic	6209.349	Durbin-Watson stat	2.471603
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 7

Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests
 Pool: NURMA
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	574.870799	(9,27)	0.0000
Cross-section Chi-square	210.429521	9	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
 Dependent Variable: LOG(LAB?)
 Method: Panel Least Squares
 Date: 06/21/17 Time: 15:36
 Sample: 2012 2015
 Included observations: 4
 Cross-sections included: 10
 Total pool (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	21.16829	4.237022	4.996031	0.0000
LOG(WG?)	-1.922098	0.343104	-5.602078	0.0000
LOG(INV?)	0.035506	0.038094	0.932070	0.3575
LOG(GOV?)	0.970376	0.089913	10.79236	0.0000
R-squared	0.930227	Mean dependent var		14.04816
Adjusted R-squared	0.924412	S.D. dependent var		1.395880
S.E. of regression	0.383772	Akaike info criterion		1.017104
Sum squared resid	5.302118	Schwarz criterion		1.185992
Log likelihood	-16.34208	Hannan-Quinn criter.		1.078169
F-statistic	159.9858	Durbin-Watson stat		0.634486
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 8

Random Effect

Dependent Variable: LOG(LAB?)
 Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 06/21/17 Time: 15:37
 Sample: 2012 2015
 Included observations: 4
 Cross-sections included: 10
 Total pool (balanced) observations: 40
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	16.03447	0.517160	31.00486	0.0000
LOG(WG?)	-0.358047	0.058639	-6.105978	0.0000
LOG(INV?)	0.003736	0.005099	0.732694	0.4685
LOG(GOV?)	0.127613	0.025108	5.082591	0.0000
Random Effects (Cross)				
_SUMUT--C	0.635898			
_JAMBI--C	-0.487794			
_SUMSEL--C	0.399123			
_BENGKULU--C	-0.929655			
_LAMPUNG--C	0.282902			
_KEPRI--C	-2.811344			
_JABAR--C	0.914769			
_JATENG--C	1.115666			
_JATIM--C	1.433740			
_BANTEN--C	-0.553305			
Effects Specification				
		S.D.	Rho	
Cross-section random		0.395247	0.9935	
Idiosyncratic random		0.031929	0.0065	
Weighted Statistics				
R-squared	0.265853	Mean dependent var	0.566963	
Adjusted R-squared	0.204674	S.D. dependent var	0.066121	
S.E. of regression	0.058967	Sum squared resid	0.125178	
F-statistic	4.345498	Durbin-Watson stat	0.584265	
Prob(F-statistic)	0.010331			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.255325	Mean dependent var	14.04816	
Sum squared resid	56.58843	Durbin-Watson stat	0.001292	

Lampiran 9

Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: NURMA

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	89.786518	3	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LOG(WG?)	-0.248916	-0.358047	0.000135	0.0000
LOG(INV?)	0.003199	0.003736	0.000000	0.0444
LOG(GOV?)	0.071609	0.127613	0.000035	0.0000

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: LOG(LAB?)

Method: Panel Least Squares

Date: 06/21/17 Time: 15:38

Sample: 2012 2015

Included observations: 4

Cross-sections included: 10

Total pool (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	15.62318	0.504022	30.99699	0.0000
LOG(WG?)	-0.248916	0.059781	-4.163801	0.0003
LOG(INV?)	0.003199	0.005106	0.626395	0.5363
LOG(GOV?)	0.071609	0.025800	2.775540	0.0099

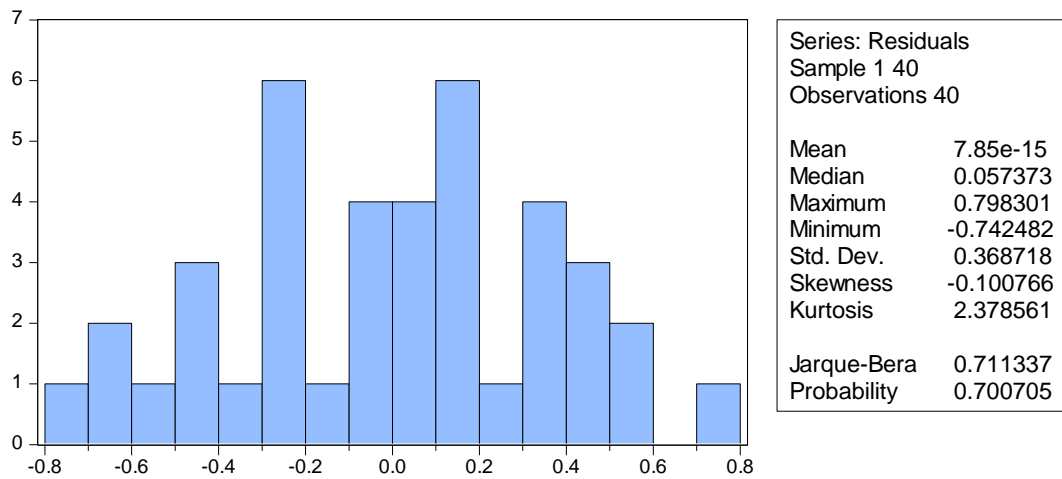
Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.999638	Mean dependent var	14.04816
Adjusted R-squared	0.999477	S.D. dependent var	1.395880
S.E. of regression	0.031929	Akaike info criterion	-3.793634
Sum squared resid	0.027526	Schwarz criterion	-3.244748
Log likelihood	88.87268	Hannan-Quinn criter.	-3.595174
F-statistic	6209.349	Durbin-Watson stat	2.471603
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 10

Deteksi Normalitas



Lampiran 11

Deteksi Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	1.754252	Prob. F(9,30)	0.1198
Obs*R-squared	13.79241	Prob. Chi-Square(9)	0.1299
Scaled explained SS	7.700538	Prob. Chi-Square(9)	0.5646

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 06/22/17 Time: 07:54

Sample: 1 40

Included observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-130.5943	100.3817	-1.300978	0.2032
LOG(WG)^2	-0.977984	0.606563	-1.612337	0.1174
LOG(WG)*LOG(INV)	-0.000148	0.133868	-0.001103	0.9991
LOG(WG)*LOG(GOV)	-0.214668	0.269801	-0.795656	0.4325
LOG(WG)	22.04054	15.45580	1.426036	0.1642
LOG(INV)^2	0.005099	0.008517	0.598682	0.5539
LOG(INV)*LOG(GOV)	-0.032045	0.033880	-0.945814	0.3518
LOG(INV)	0.233813	1.671290	0.139899	0.8897
LOG(GOV)^2	-0.041908	0.049803	-0.841476	0.4067
LOG(GOV)	3.422048	3.679655	0.929991	0.3598
R-squared	0.344810	Mean dependent var	0.132554	
Adjusted R-squared	0.148253	S.D. dependent var	0.157617	
S.E. of regression	0.145465	Akaike info criterion	-0.805446	
Sum squared resid	0.634801	Schwarz criterion	-0.383226	
Log likelihood	26.10891	Hannan-Quinn criter.	-0.652784	
F-statistic	1.754252	Durbin-Watson stat	2.029092	
Prob(F-statistic)	0.119781			

Lampiran 12

Deteksi Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
 Date: 06/22/17 Time: 07:59
 Sample: 1 40
 Included observations: 40

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
LOG(WG)	0.117722	3114.838	2.080948
LOG(INV)	0.001451	58.03705	1.332400
LOG(GOV)	0.008084	306.0020	1.930988
C	17.95254	4875.688	NA

Lampiran 13

Deteksi Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.728514	Prob. F(2,34)	0.1928
Obs*R-squared	3.691727	Prob. Chi-Square(2)	0.1579

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 07/06/17 Time: 16:45

Sample: 1 40

Included observations: 40

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.119895	4.213831	0.265767	0.7920
LOG(WG)	-0.091109	0.341301	-0.266945	0.7911
LOG(INV)	-0.006288	0.037882	-0.165978	0.8692
LOG(GOV)	-0.012388	0.089097	-0.139043	0.8902
RESID(-1)	0.314120	0.174084	1.804418	0.0800
RESID(-2)	-0.025686	0.187516	-0.136982	0.8919
R-squared	0.092293	Mean dependent var		7.85E-15
Adjusted R-squared	-0.041193	S.D. dependent var		0.368718
S.E. of regression	0.376235	Akaike info criterion		1.020277
Sum squared resid	4.812803	Schwarz criterion		1.273609
Log likelihood	-14.40554	Hannan-Quinn criter.		1.111874
F-statistic	0.691406	Durbin-Watson stat		2.001516
Prob(F-statistic)	0.633391			

Lampiran 14

Data Panel

Provinsi	Tahun	LAB	WG	INV	GOV
Sumatera Utara	2012	2637930	16813	653991	178793
Sumatera Utara	2013	2589638	18377	1003693	192783
Sumatera Utara	2014	2601757	19283	619566	210476
Sumatera Utara	2015	2327828	20209	221198	217751
Jambi	2012	789870	16417	1286598	82853
Jambi	2013	750975	18829	317485	129891
Jambi	2014	720107	20446	562893	145124
Jambi	2015	786695	21262	798694	122673
Sumatera Selatan	2012	1983771	17149	1540813	105631
Sumatera Selatan	2013	1879981	18813	1572811	174571
Sumatera Selatan	2014	1949516	19458	2497421	194256
Sumatera Selatan	2015	1904484	21137	1356369	178980
Bengkulu	2012	466713	18014	189040	65524
Bengkulu	2013	462504	19337	197482	110570
Bengkulu	2014	479123	20577	150958	99118
Bengkulu	2015	455250	21013	400639	111229
Lampung	2012	1709153	13344	732968	65081
Lampung	2013	1716171	15095	95849	99059
Lampung	2014	1731680	16564	37356	97393
Lampung	2015	1721553	18015	349534	115465
Kepulauan Riau	2012	52712	27074	13580	20401
Kepulauan Riau	2013	47664	33007	330	25273
Kepulauan Riau	2014	44327	35827	10048	33983
Kepulauan Riau	2015	47897	40307	16607	26481
Jawa Barat	2012	3594392	16637	234046	300569
Jawa Barat	2013	3473209	18226	58674	349087
Jawa Barat	2014	3635628	19994	324863	347554
Jawa Barat	2015	3413358	21675	681028	391063
Jawa Tengah	2012	4837914	12826	678661	269249
Jawa Tengah	2013	4571767	13828	157150	330147
Jawa Tengah	2014	4848117	15010	103128	364642
Jawa Tengah	2015	4789935	16438	47548	389665
Jawa Timur	2012	7228786	13054	25399	561911
Jawa Timur	2013	6990025	14630	61106	578044
Jawa Timur	2014	6957609	15710	327601	619087

Jawa Timur	2015	6858661	17449	126718	663005
Banten	2012	611575	20113	87825	41628
Banten	2013	645195	23285	36110	59140
Banten	2014	579691	26298	2250	84973
Banten	2015	593144	27572	153420	116819

Tabel Persentase Distribusi F untuk Probabilitas = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	218	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.78	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.48	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.28	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.92
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03	1.99	1.96	1.94	1.91
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02	1.99	1.96	1.93	1.91
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.95	1.92	1.90
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.92	1.89

Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 40)

df	Pr	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
1		1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2		0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3		0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4		0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5		0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6		0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7		0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8		0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9		0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24964	4.29681
10		0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11		0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12		0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13		0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14		0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15		0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16		0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17		0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18		0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19		0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20		0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21		0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22		0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23		0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24		0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25		0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26		0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27		0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28		0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29		0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30		0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31		0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32		0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33		0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34		0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35		0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36		0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37		0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38		0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39		0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40		0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

RIWAYAT HIDUP



Nurma Eka Lestari, anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Endi Nursianto dan Rachmawati. Lahir di Gresik, 4 Oktober 1995. Bertempat tinggal di Jalan Bambu Kuning Rt. 012/002 No. 54, Marunda, Jakarta Utara.

Riwayat Pendidikan: Penulis memulai pendidikan di Taman Kanak – Kanak Al-Furqon, melanjutkan sekolah di SDN 04 Petang (lulus tahun 2007), SMPN 162 Jakarta (lulus tahun 2010), SMAN 73 Jakarta

(lulus tahun 2013) dan kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta dengan Prodi Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Ekonomi Koperasi pada tahun 2013.

Pengalaman Kerja: Praktik Kerja lapangan (PKL) di Biro Klasifikasi Indonesia pada bulan Januari-Februari 2016. Praktik Kegiatan Mengajar (PKM) di SMA Negeri 72 Jakarta pada bulan Agustus – November 2016. Mengajar di Bimbingan Belajar Seyum mulai tahun 2013.

Jika ada yang ingin memberikan saran, masukan dan bertanya dapat diajukan melalui email: nurma.ekaa@gmail.com